

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN
2018-2023

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian juga yang diamanatkan Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membawa implikasi terhadap menguatnya kemandirian daerah dalam pengelolaan pendidikan.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Klungkung perlu dilakukan melalui perencanaan yang matang dan terarah sebagai pegangan dan strategi bagi pengelola pendidikan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Dimana pada pasal 1 angka 29 dalam permendagri No 86 Tahun 2017 di jelaskan Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Berpedoman pada peraturan yang sama, dalam pasal 13 ayat 1 di jelaskan beberapa hal yang harus termuat didalam dokumen renstra diantaranya tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Melihat pengertian diatas maka dapat disimpulkan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung merupakan rencana yang komprehensif untuk mengoptimalkan segala sumber daya pendidikan kepemudaan dan olahraga yang ada guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Fungsi renstra adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj).

Adapun beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2018-2023 antara lain:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Rencana starategis (renstra) dinas Pendidikan yang telah tersusun nantinya harus mengacu pada rencana jangka menengah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. di samping itu rencana strategis renstra yang telah tersusun nantinya akan digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan yang memuat tentang program, kegiatan yang akan dilaksanakan maupun jumlah anggaran yang diperlukan dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut yang dirangkum baik dalam rencana kinerja anggara (RKA) maupun dokumen pelaksanaan anggran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung.

1.2. Landasan Hukum:

Dokumen Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung ini merujuk pada sejumlah dasar hukum, antara lain:

- 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025;
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Bidang Pendidikan;

- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2009-2025;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung;
- 18 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2018-2023, Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor ...;
- 20 Peraturan Bupati Klungkung nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis 2018-2023 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

Maksud:

- 1 Sebagai dokumen resmi bagi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga untuk melaksanakan tugas dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten yang telah ditetapkan.
- 2 Sebagai wujud pelaksanaan salah satu fungsi manajemen yang terdiri dari, tindakan perencanaan (*planning*), yang efektif, efisien dan sistematis dan berkelanjutan.
- 3 menjabarkan lebih lanjut Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan.

Tujuan :

- 1 Membuat dokumen resmi perencanaan strategis selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (lima tahunan).

- 2 Memberikan gambaran maupun tindak lanjut dari RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 yang dirancang secara konseptual, realistis dan rasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dengan tekad mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Klungkung yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018 – 2023 terdiri dari:

- 1 BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- 2 BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, memuat informasi tentang peran, tugas dan fungsi, sumber daya, kinerja, tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.
- 3 BAB III Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi, menguraikan dan mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, telaahan visi dan misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi serta penentuan isu-isu strategis.
- 4 BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, mengemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, tujuan dan sasaran.
- 5 BAB V Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.
- 6 BAB VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
- 7 BAB VII Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung, dan sejalan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, maka Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di wilayah Kabupaten Klungkung mengemban tugas pokok untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Selain tugas pokok tersebut dan berdasarkan peraturan dan hal-hal lain yang telah diuraikan diatas, Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung juga memiliki beberapa beberapa fungsi diantaranya:

- a. perumuskan kebijakan tugas di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan tugas di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi dinas tugas di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

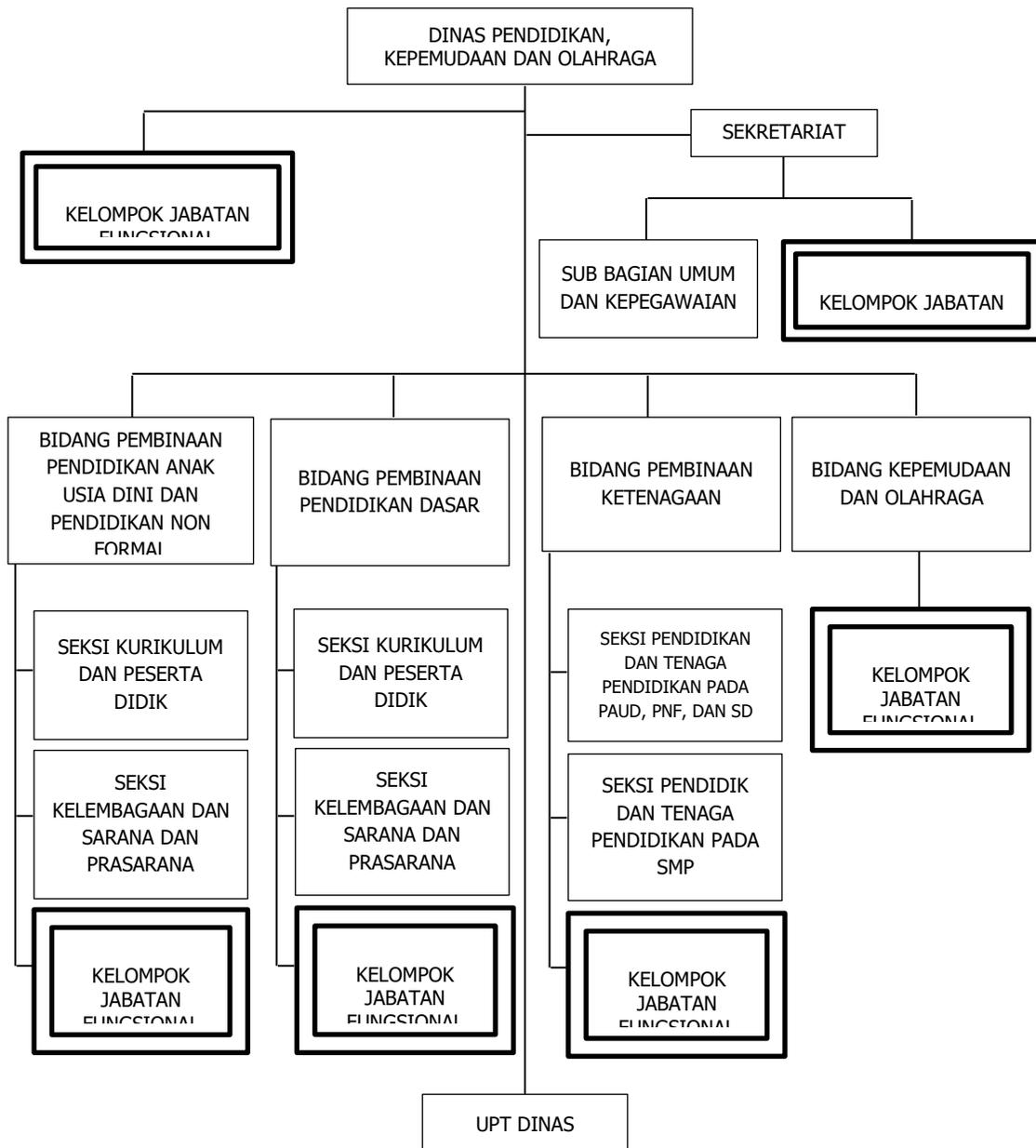
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang kepala dinas dan dalam pelaksanaan tugas dinas sehari-hari kepala dinas dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris yang memiliki tugas pokok membantu kepala dinas menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan meliputi bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tata usaha, reformasi birokrasi,

perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah. Selain sekretaris, kepala dinas juga dibantu oleh 4 (empat) orang kepala bidang yang melaksanakan tugas teknis pelaksanaan urusan pendidikan, ketiga kepala bidang tersebut adalah:

- a. Kepala bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal memiliki tugas pokok membantu kepala dinas melaksanakan koordinasi perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter peserta didik pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- b. Kepala bidang pembinaan pendidikan dasar memiliki tugas pokok membantu kepala dinas melaksanakan koordinasi perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter peserta didik pada pendidikan dasar.
- c. Kepala bidang pembinaan ketenagaan memiliki tugas pokok melaksanakan koordinasi perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal.
- d. Kepala bidang kepemudaan dan olahraga memiliki tugas membantu kepala dinas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda serta pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan urusan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung memiliki sumber daya manusia yang terbagi dalam beberapa eselon jabatan dan keahlian. Untuk melihat lebih rinci tentang sumber daya tersebut berikut disajikan tabel sumber daya manusia Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung:

Tabel 2.1
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)
Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

JABATAN	ESELON	JUMLAH PERSONIL
Kepala Dinas (KADIS)	II/b	1 orang
Sekretaris (SEKDIS)	III/a	1 orang
Ka.Bid Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan PNF	III/b	1 orang
Ka.Bid Pembinaan Pendidikan Dasar (PPD)	III/b	1 orang
Ka.Bid Kepemudaan dan Olahraga	III/b	1 orang
Ka.Si Kurikulum dan Peserta Didik Bid. PPD	IV/a	1 orang
Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian (SEKDIS)	IV/a	1 orang
Ka.Si Kelembagaan, Sarana dan Prasarana	IV/a	1 orang
Ka.Bid Pembinaan Ketenagaan	III/b	1 orang
Ka.Si PTK PAUD,PNF,& SD	IV/a	1 orang
Ka.Si Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	IV/a	1 orang
Ka.Si Kurikulum dan Peserta Didik (PAUD&PNF)	IV/a	1 orang
Ka.Si Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bid.PPD	IV/a	1 orang
JF Pengawas Sekolah Utama	Jabatan Fungsional Tertentu	2 orang
JF Pengawas Sekolah Muda	Jabatan Fungsional Tertentu	14 orang
JF Perencana Muda (Sub Koordinator)	Jabatan Fungsional Tertentu	1 orang
JF Widyaprada Muda (Sub Koordinator)	Jabatan Fungsional Tertentu	2 orang
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	Jabatan Fungsional Tertentu	1 orang
JF Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator)	Jabatan Fungsional Tertentu	2 orang
JF Penilik	Jabatan Fungsional Tertentu	2 orang
Analisis Kepemudaan	Jabatan Fungsional Umum	1 orang
Analisis Pengembangan Karir PTK	Jabatan Fungsional Umum	2 orang
Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	Jabatan Fungsional Umum	2 orang
Analisis Pengembangan SarPras pembelajaran	Jabatan Fungsional Umum	1 orang
Analisis Penyelenggaraan Ujian	Jabatan Fungsional Umum	1 orang
Bendahara	Jabatan Fungsional Umum	1 orang
Pembina Karakter	Jabatan Fungsional Umum	2 orang
Pengadministrasi Keuangan	Jabatan Fungsional Umum	1 orang
Pengadministrasi Umum	Jabatan Fungsional Umum	1 orang
Pengelola Data Tenaga Kependidikan (SMP)	Jabatan Fungsional Umum	1 orang
Pengelola Kepegawaian	Jabatan Fungsional Umum	3 orang
Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Jabatan Fungsional Umum	2 orang
Pranata Taman	Jabatan Fungsional Umum	4 orang
Verifikator Keuangan	Jabatan Fungsional Umum	2 orang
Staf Pembantu	Tenaga Honorer Daerah	76 orang

Untuk melaksanakan layanan urusan pendidikan kepala dinas dibantu oleh kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang bertempat pada satuan pendidikan negeri sebagai unit pelaksana teknis daerah serta lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (lembaga swasta) dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan

No	Kecamatan	Kepala Satuan Pendidikan (Negeri)				Jumlah	Kepala PAUD (Swasta)	Kepala PKBM (Swasta)
		SD	SMP	TK	SKB			
1	Banjarangkan	31	5	14	1	51	26	-
2	Dawan	23	3	12	-	38	13	1
3	Klungkung	27	4	12	-	43	32	-
4	Nusa Penida	53	10	12	-	75	18	1
Jumlah		134	22	50	1	207	89	2

Jumlah Guru Pada Satuan Pendidikan Dasar Berdasarkan Status Kepegawaian

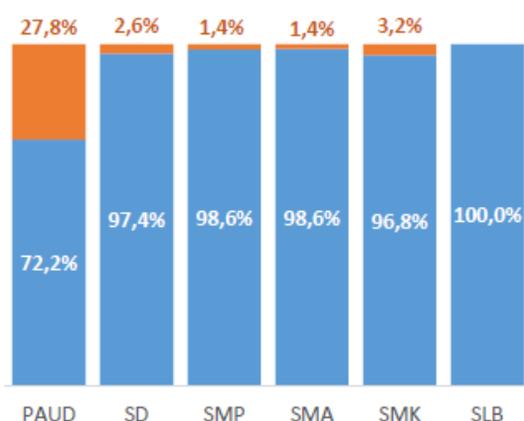
No	Kecamatan	SD				SMP			
		PNS	PPPK	Honor Daerah	Honor Sekolah	PNS	PPPK	Honor Daerah	Honor Sekolah
1	Banjarangkan	174	48	24	7	106	11	11	6
2	Dawan	127	25	13	5	91	5	13	3
3	Klungkung	191	60	21	10	132	18	27	5
4	Nusa Penida	340	50	52	7	121	14	36	8
Jumlah		832	183	110	28	450	48	87	22

Jumlah Guru Pada Satuan TK-PAUD dan SPNF Berdasarkan Status Kepegawaian

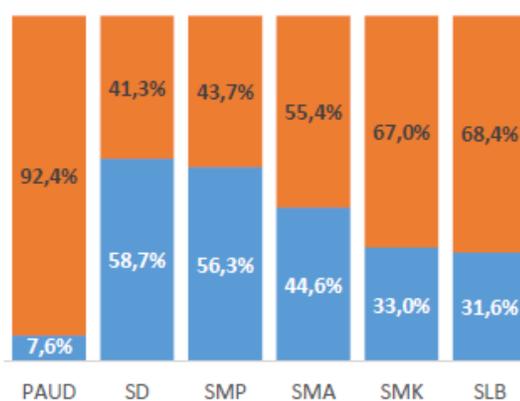
No	Kecamatan	TK-PAUD (Negeri)		TK-PAUD (Swasta)		SPNF SKB (Negeri)		SPNF PKBM (Swasta)	
		PNS	Honor Daerah	GTY	Honor Sekolah	PNS	Honor Daerah	Honor Sekolah	Honor Sekolah
1	Banjarangkan	20	21	60	6	8	7	-	-
2	Dawan	17	34	31	-	-	-	22	-
3	Klungkung	27	37	86	2	-	-	-	-
4	Nusa Penida	22	21	31	4	-	-	-	18
Jumlah		86	113	208	12	8	7	22	18

Sedangkan jika diukur dari segi kompetensinya perbandingan antara jumlah guru yang sudah berkualifikasi ijazah S1 dan belum berijazah S1 serta guru yang telah memiliki sertifikat pendidik serta belum memiliki sertifikat pendidik digambarkan pada grafik berikut :

KUALIFIKASI GURU



GURU TERSERTIFIKASI



Untuk melayani guru dan siswa yang ada dilingkungan sekolah, dibutuhkan juga tenaga administrasi sekolah, berikut tabel yang menggambarkan jumlah tenaga administrasi sekolah :

Jumlah Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar

No	Kecamatan	SD				SMP			
		PNS	PPPK	Honor Daerah	Honor Sekolah	PNS	PPPK	Honor Daerah	Honor Sekolah
1	Banjarangkan	3	-	35	1	9	-	24	-
2	Dawan	1	-	22	3	9	-	17	-
3	Klungkung	4	-	47	6	6	-	18	-
4	Nusa Penida	4	-	38	4	6	-	20	-
	Jumlah	12	-	142	14	30	-	79	-

Jumlah Tenaga Kependidikan Pada Satuan TK-PAUD dan SPNF

No	Kecamatan	TK-PAUD (Negeri)		TK-PAUD (Swasta)		SPNF SKB (Negeri)		SPNF PKBM (Swasta)
		PNS	Honor Daerah	GTJ	Honor Sekolah	PNS	Honor Daerah	Honor Sekolah
1	Banjarangkan	-	4	2	-	2	8	-
2	Dawan	-	4	1	-	-	-	-
3	Klungkung	-	2	2	-	-	-	-
4	Nusa Penida	-	4	1	2	-	-	1
	Jumlah	-	14	6	2	2	8	1

Selain sumber daya manusia, untuk membantu menjalankan pelayanannya Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung juga didukung oleh sumber daya material (bangunan, peralatan, perlengkapan, bahan dan perbekalan). dilihat dari sumber daya material Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga telah memiliki sebuah gedung kantor dimana dalam gedung tersebut telah didirikan beberapa bangunan seperti pos keamanan, ruang rapat, gedung pelayanan yang terdiri dari satu ruangan kepala dinas dan satu ruangan sekretaris, tiga ruangan kepala bidang, satu buah ruang pengawas dan empat belas ruang untuk kasi, kasubag dan staf. Prasarana yang tersedia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Ketersediaan Material Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung

JENIS PRASARANA	KEBUTUHAN	JUMLAH YANG ADA	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	
Gedung Unit 1	1	1		1		Bertingkat
Ruang kepala dinas	1	1		1		Lantai 1
Ruang sekretaris	1	1		1		Lantai 1
Ruang kepala bidang	3	3		1	2	Lantai 2 : bocor
Ruang kasubag/kasi	14	14		6	8	
Toilet	4	2		2		
Gedung Unit 2	1	1				Lantai 1
Ruang kasi/staf	1	1	1			
Toilet	2	1			1	
Gedung Unit 3	1	1			1	Lantai 1

Ruang rapat kapasitas 50 orang	1	1			1	Kayu kuda-kuda pada atap sudah lapuk dan bocor
Gudang	2	2			2	
Gedung Unit 4	1	1	1			Lantai 1
Ruang Arsip 1	1	1	1			
Gedung Unit 5	1	1	1			Lantai 1
Ruang Arsip 2	1	1	1			

Pada tiap-tiap ruangan yang tersedia juga telah dilengkapi dengan kebutuhan mebeler seperti kursi dan meja kerja dan beberapa perlengkapan lain seperti komputer laptop dan peralatan lain yang yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing bidang namun dari segi kuantitas dan kualitas masih perlu ditingkatkan. Selain itu untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung Kepemudaan dan Olahraga juga telah menyediakan sebanyak 65 kendaraan Dinas, diantaranya 4 unit mobil Dinas dan 61 unit motor dinas. Sarana yang tersedia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Prasarana Pendukung Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung

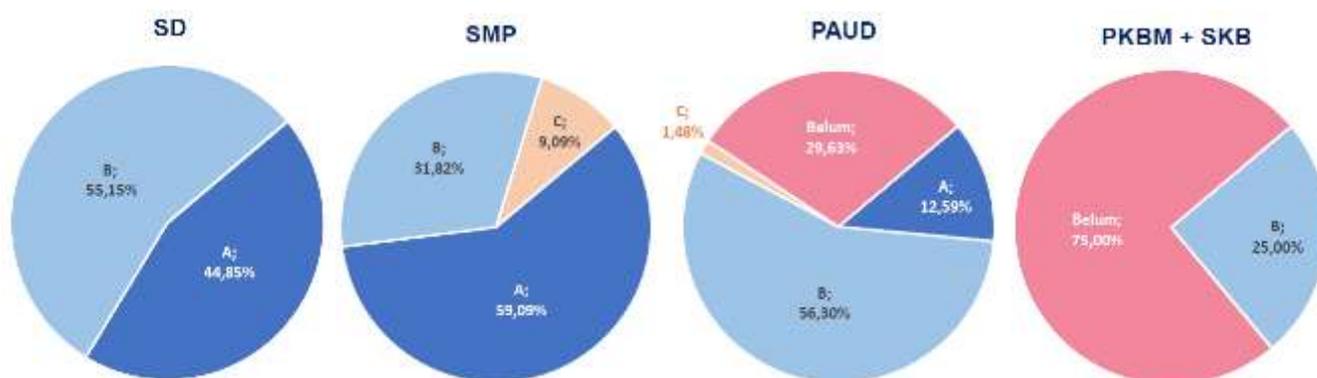
Jenis Sarana	Kebutuhan	Jumlah Yang Ada	Kondisi		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
Meja Kerja	57	65	32	25	8
Kursi Kerja	57				
Meja Rapat	20	11	6	3	2
Kursi Rapat	50	50	40		10
Kursi/Meja Tamu	4	5	2	2	1
Komputer PC	57	30	18		5
Laptop	15	10	6	2	2
Kendaraan Roda 4	4	4	1	3	
Kendaraan Roda 2	61	65	35	20	10

Selain sarana prasarana perkantoran, tersedia pula sarana untuk melaksanakan urusan pendidikan yaitu unit pelaksana teknis daerah (UPTD) satuan pendidikan negeri yang tersebar pada 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Klungkung, selain satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, terdapat pula satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, tabel berikut menggambarkan jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Klungkung :

Jumlah Sekolah di Kabupaten Klungkung

No	Kecamatan	Satuan Pendidikan (Negeri)				Jumlah	PAUD (Swasta)	SPNF PKBM (Swasta)
		SD	SMP	TK	SKB			
1	Banjarangkan	31	5	14	1	51	26	-
2	Dawan	23	3	12	-	38	13	1
3	Klungkung	27	4	12	-	43	32	-
4	Nusa Penida	53	10	12	-	75	18	1
	Jumlah	134	22	50	1	207	89	2

Akreditasi sekolah berdasarkan data tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :



Agar proses kegiatan belajar dapat berlangsung dengan baik maka diperlukan sejumlah sarana dan prasarana yang menunjang proses belajar mengajar, berikut disajikan sarana prasarana yang tersedia pada satuan pendidikan.

Tabel 2.4
Ketersediaan Ruang Kelas dan Ruang Penunjang SD Di Kabupaten Klungkung

Kecamatan	Jumlah Rombel	Kebutuhan Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas	+/- Ruang Kelas	Baik	Rusak
Banjarangkan	196	196	204	8	204	8
Dawan	140	140	156	16	156	16
Klungkung	225	225	245	20	245	20
Nusa Penida	322	322	318	-4	318	0
Jumlah	883	883	923	40	923	0
Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan	Jumlah Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Guru	Jumlah Ruang Tata Usaha	
Banjarangkan	31	31	19	19	27	
Dawan	23	23	14	14	22	
Klungkung	27	27	24	24	26	
Nusa Penida	53	53	23	23	45	
Jumlah	134	134	80	80	120	

Tabel 2.5
Ketersediaan Ruang Kelas dan Ruang Penunjang SMP Di Kabupaten Klungkung

Kecamatan	Jumlah Rombel	Kebutuhan Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas	+/- Ruang Kelas	Baik	Rusak
Banjarangkan	64	64	65	1	64	1
Dawan	59	59	63	4	59	4
Klungkung	98	98	98	9	98	9
Nusa Penida	85	85	85	24	85	24
Jumlah	306	306	344	40	306	40
Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan	Jumlah Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Guru	Jumlah Ruang Tata Usaha	
Banjarangkan	5	5	3	3	5	
Dawan	3	3	4	4	3	
Klungkung	4	4	4	4	4	
Nusa Penida	10	10	8	8	10	
Jumlah	22	22	19	19	22	

Tabel 2.6
Ketersediaan Ruang Kelas dan Ruang Penunjang PAUD Di Kabupaten Klungkung

Kecamatan	Jumlah Rombel	Kebutuhan Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas	+/- Ruang Kelas	Baik	Rusak
Banjarangkan	95	95	95	0	70	25
Dawan	70	70	70	0	55	15
Klungkung	108	108	108	0	98	20
Nusa Penida	53	53	53	0	42	11
Jumlah	326	326	326	0	265	61
Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan	Jumlah Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Guru	Jumlah Ruang Tata Usaha	
Banjarangkan	40	1	16	4	4	
Dawan	25	1	10	6	7	
Klungkung	44	2	26	8	8	
Nusa Penida	30	2	11	8	8	
Jumlah	139	6	63	26	27	

KONDISI AKSES LISTRIK



KONDISI AKSES INTERNET



SANITASI SEKOLAH

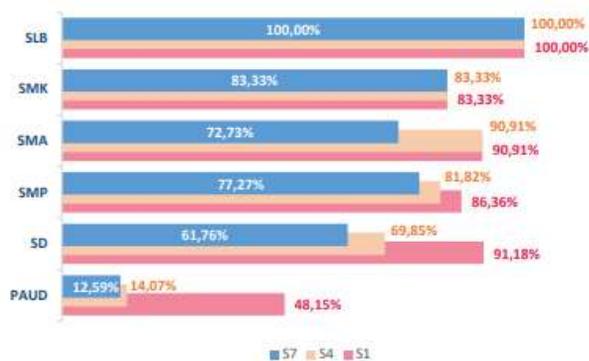
Sumber Air



Sarana Cuci Tangan



Kondisi Toilet



KETERANGAN INDIKATOR SANITASI SEKOLAH

W1 : % Sekolah dengan sumber air di lingkungan sekolah

W2 : % Sekolah dengan sumber air layak dan tersedia di lingkungan sekolah

W3 : % Sekolah dengan sumber air layak, tersedia di lingkungan sekolah dan cukup (tersedia sepanjang waktu)

S1 : % Sekolah memiliki toilet

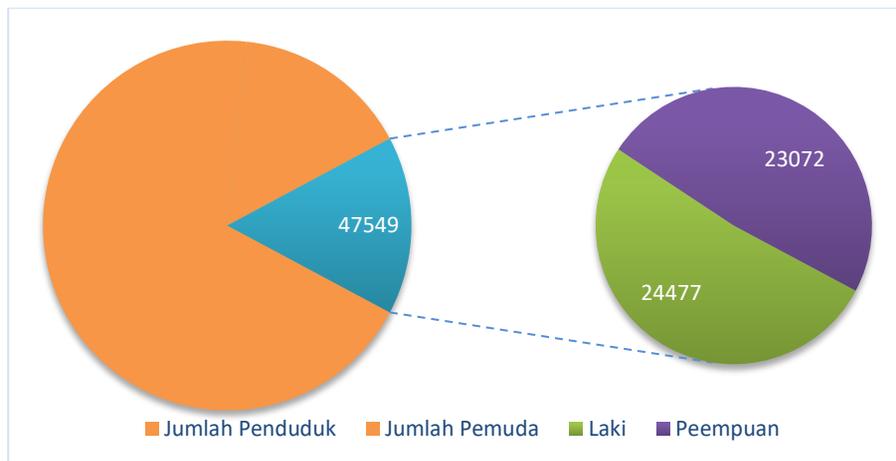
S4 : % Sekolah memiliki toilet terpisah

S7 : % Sekolah memiliki toilet layak dan terpisah dengan kondisi baik dan rusak ringan

H1 : % Sekolah dengan sarana cuci tangan

H2 : % Sekolah dengan sarana cuci dengan sabun dan air mengalir

Sumber daya bidang kepemudaan di Kabupaten Klungkung terbilang cukup besar, menurut undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan definisi pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Sedangkan kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Jumlah pemuda pada rentang umur 16-30 tahun menurut data BPS Kabupaten Klungkung berjumlah 47.549 orang atau sebesar 22,63% dari jumlah penduduk Kabupaten Klungkung.



Dalam melaksanakan urusan di bidang kepemudaan dan olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga berkolaborasi dengan beberapa organisasi pemuda seperti Kwartir Cabang (Kwarcab), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) serta Purna Paskibraka Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Klungkung.

Untuk melaksanakan urusan olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
- b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- c. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah;
- d. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di daerah; dan

- e. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.

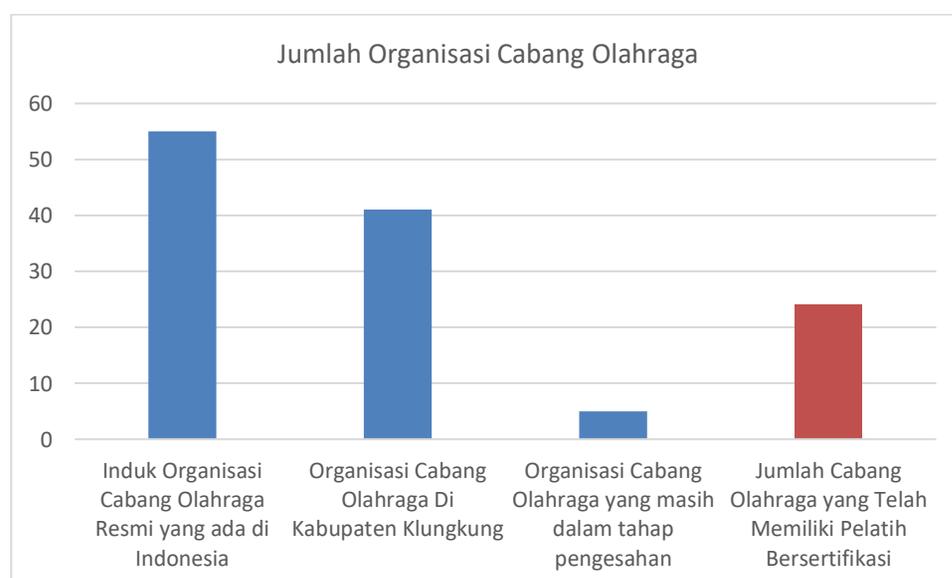
Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

Olahraga pendidikan dilaksanakan secara integral dalam sistem pendidikan nasional yang dilaksanakan pada satuan pendidikan. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat kabupaten/kota dalam bentuk komite yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Klungkung.

Sumber daya yang dimiliki Kabupaten Klungkung untuk melaksanakan urusan olahraga antara lain adalah organisasi cabang olahraga, sampai dengan tahun 2022 terdapat 41 organisasi cabang cabang olahraga yang telah terbentuk, dan 5 cabang olahraga yang masih dalam tahapan untuk disahkan menjadi cabang olahraga resmi di Kabupaten Klungkung.

Jumlah pelatih yang telah bersertifikat juga menjadi faktor keberhasilan pembangunan olahraga tingkat daerah, berikut gambaran perbandingan jumlah induk organisasi olahraga nasional dan induk organisasi olahraga yang ada di Kabupaten Klungkung serta jumlah cabang olahraga yang telah memiliki pelatih bersertifikat.



Jumlah Cabang Olahraga dan Pelatih Bersertifikat

NO	CABANG OLAHRAGA	SERTIFIKAT PELATIH YANG DIMILIKI	JUMLAH PELATIH
1	Atletik	Pelatih Atletik Tingkat Dasar	1 Orang
		Pelatih Atletik Level I	1 Orang
		Pelatih Atletik Madya	1 Orang
		Pelatih Fisik Tingkat Dasar	2 Orang
2	Bola Basket	Pelatih Bola Basket Lisensi C	1 Orang
		Pelatih Nasional Lisensi A	1 Orang
3	Bola Tangan	Pelatih Fisik Tingkat Dasar	1 Orang
4	Bola Voli	Pelatih Daerah Bola Voli indoor	1 Orang
		Pelatih Fisik Tingkat Dasar	3 Orang
5	Bulutangkis	Pelatih Fisik Tingkat Dasar	1 Orang
6	Cricket	Pelatih Cricket Level I	2 Orang
7	Gateball	Pelatih Fisik Tingkat Dasar	2 Orang
8	Judo	Pelatihan Judo Tingkat Daerah	1 Orang
		Pelatih Nageno Kata dan Juno Kata	1 Orang
9	Kabaddi	Pelatih Fisik Tingkat Dasar	2 Orang
10	Karate	Pelatih Fisik Tingkat Dasar	1 Orang
		Pelatih Pratama Tingkat Nasional	1 Orang
11	Menembak	Pelatih Menembak Lisensi C Nasional	1 Orang
12	Muaythai	Pelatih Fisik Tingkat Dasar	1 Orang
13	Panahan	Pelatihan Panahan Tingkat Dasar	5 Orang
14	Panjat tebing	Level I Nasional Pelatih Panjat Tebing	2 Orang
		Pelatih Fisik Tingkat Dasar	1 Orang
15	Pencak Silat	Pelatih Madya Pencak Silat	1 Orang
		Pelatih Fisik Tingkat Dasar	2 Orang
16	Petanque	Pelatih Petanque Level I	3 Orang
17	Renang	Pelatih Fisik Tingkat Dasar	1 Orang
18	Senam	Pelatih Senam Artistik	1 Orang
19	Sepakbola	Pelatih Fisik Tingkat Dasar	1 Orang
20	Taekwondo	Pelatih Taekwondo Tingkat Daerah	2 Orang
21	Tarung Derajat	Pelatih Fisik Tingkat Dasar	2 Orang
22	Tenis Meja	Pelatih Fisik Tingkat Dasar	2 Orang
23	Wodball	Pelatih Fisik Tingkat Dasar	2 Orang
24	Wushu	Pelatih Fisik Tingkat Dasar	1 Orang
		Pelatih Nasional Wushu	1 Orang
J U M L A H			52 Orang

Prasarana olahraga juga memiliki peran penting untuk memajukan olahraga prestasi, mengembangkan olahraga pendidikan serta memasyarakatkan gerakan hidup sehat melalui olahraga. Beberapa fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten Klungkung antara lain :

No	SARANA DAN PRASARANA	KEPEMILIKAN
----	----------------------	-------------

	Cabang Olahraga	Jenis Sarana dan Prasarana	Pemerintah	Masyarakat
1	Bola Voli	Lapangan Voli	1	12
2	Lapangan Basket	Lapangan Basket	2	1
3	Lapangan Tenis	Lapangan Tenis	1	3
4	Bulu Tangkis	Lapangan Bulu Tangkis	0	23
5	Gedung Olahraga (GOR)	Semua Cabang	1	0
6	Kolam Renang	Kolam Renang	1	1
7	Sasana Bela Diri	Sasana Bela Diri	0	2
8	Rumah Biliar	Biliar	0	13
9	Panjat Tebing	Panjat Tebing	1	0
10	Pentaque	Lapangan Pentaque	1	0
11	Kriket	Lapangan Kriket	1	0
12	Lompat Jauh	Lompat Jauh	1	0
13	Lapangan Futsal	Gedung Futsal	0	3
14	Tenis Meja	Tenis Meja	0	39
J U M L A H			10	97

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Capaian Kinerja Organisasi merupakan gambaran keberhasilan kinerja yang dilakukan oleh suatu instansi/organisasi dalam kurun waktu tertentu sesuai target tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan strategis. Tujuan dan indikator tujuan yang di tetapkan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, hal ini seiring dengan salah misi dari Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam upaya mewujudkan Kabupaten Klungkung yang unggul dan sejahtera yang juga merupakan visi Kabupaten Klungkung dalam periode 2018 sampai dengan 2023.

Tabel Indikator Tujuan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Renstra	Satuan
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kabupaten Klungkung	Rata-rata lama sekolah	8.16	tahun
		Angka Harapan Lama Sekolah	13.02	tahun
2	Meningkatkan Kapasitas Pemuda dan Atlet Kabupaten Klungkung	Jumlah Pemuda dan Atlet Kabupaten Yang Berprestasi Tingkat Provinsi Dan Nasional	283	orang

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS)

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Dimana tinggi rendahnya angka

rata-rata lama sekolah akan mencerminkan tinggi rendahnya kualitas pendidikan di suatu wilayah tertentu.

Data ARLS penduduk Kabupaten Klungkung yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, dari data tersebut maka diperoleh besaran angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Klungkung untuk tahun 2021 adalah sebesar 8,14 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Klungkung yang ada dalam rentang usia 15 tahun keatas hanya mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat 9 jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP).

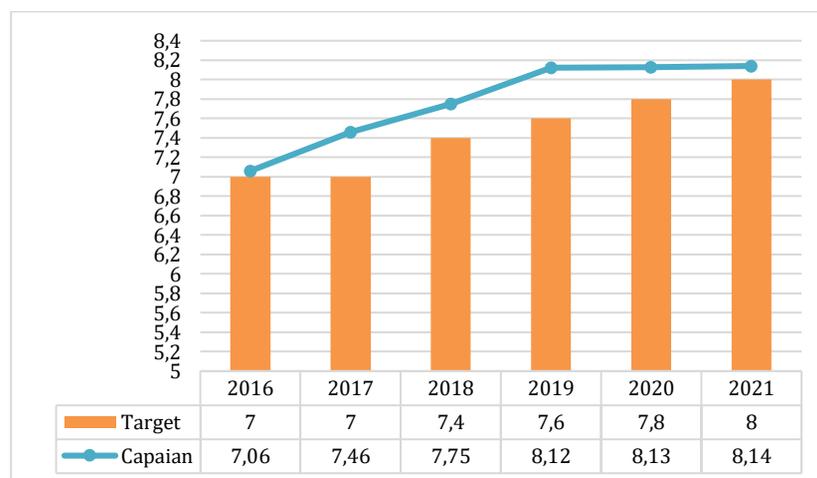
Meskipun tergolong dalam kategori yang rendah namun besaran angka rata-rata lama sekolah untuk tahun 2021 ini telah mampu melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 8,00 tahun. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 104,23%.

Sedangkan untuk melihat perkembangan angka rata-rata lama sekolah di wilayah Kabupaten Klungkung dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Perkembangan Angka rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Klungkung Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Klungkung	Rata-rata lama sekolah (tahun)	7.06	7.46	7.75	8.12	8.13	8.14

Grafik Angka Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Klungkung
Dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021



Dari tabel dan grafik diatas menunjukkan adanya peningkatan capaian realisasi Indikator kinerja Angka Rata Rata Lama Sekolah selama 5 tahun terakhir, meskipun demikian capaian di tahun 2021 masih di bawah capaian

angka rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Bali sebesar yaitu sebesar 9.06 tahun.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Adapun besaran angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Klungkung tahun 2021 ini adalah sebesar 13.00 tahun. Data ini memiliki makna bahwa secara rata-rata penduduk/siswa berusia 7 tahun yang masuk pada jenjang pendidikan formal di tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13.00 tahun atau setara dengan Diploma I.

Capaian ini masih di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 13.25 tahun, sehingga ini menyebabkan capaian kinerja angka harapan lama sekolah untuk tahun 2021 hanya sebesar 98.11%. Capaian HLS tahun 2021 ini juga masih di bawah capaian angka harapan lama sekolah Provinsi Bali yang sebesar 13.40 tahun dan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Bali, Kabupaten Klungkung menempati urutan ke 6 dari 9 kabupaten yang ada di Bali, di bawah Denpasar, Badung, Gianyar, Buleleng dan Tabanan. Untuk melihat lebih jelas bagaimana capaian daripada angka harapan lama sekolah Kabupaten Klungkung bila di bandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bali maka dapat di lihat pada tabel berikut:

Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Bali
Dari Tahun 2018 Sampai Dengan Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)			
		2018	2019	2020	2021
1	Kota Denpasar	13,98	13,99	14,00	14,09
2	Kab. Badung	13,95	13,97	13,98	13,99
3	Kab. Gianyar	13,71	13,80	13,89	13,97
4	Kab. Buleleng	12,89	12,91	13,07	13,08
5	Kab. Tabanan	12,96	12,99	13,00	13,01
6	Kab. Klungkung	12,95	12,98	12,99	13,00
7	Kab. Jembrana	12,61	12,63	12,65	12,92
8	Kab. Karangasem	12,39	12,40	12,41	12,42
9	Kab. Bangli	12,31	12,33	12,34	12,35
Provinsi Bali		13,23	13,27	13,33	13,40

Meskipun masih diposisi bawah , namun bila dilihat dari tabel diatas dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (dari Tahun 2018 sampai dengan 2020) capaian realisasi dari indikator ini terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 capaian angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Klungkung hanya sebesar 12.95 tahun, kemudian mengalami peningkatan sebanyak 0.3 sehingga menjadi 12.98 di tahun dan meningkat kembali di tahun 2020 menjadi

12.99 tahun. Untuk melihat lebih jelas perkembangan angka harapan lama sekolah tersebut dapat dilihat pada Grafik berikut:



Capaian sasaran dapat dipakai untuk perencanaan kedepan dan pengambilan kebijakan sesuai capaian hasil yang diperoleh. Untuk lebih jelasnya berikut akan dijelaskan analisis capaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung yang meliputi 2 sasaran strategis untuk pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung sebagai berikut.

CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Penerapan SPM di Kabupaten Klungkung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Sebagai pelaksanaan SPM di daerah Kemendagri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal di Daerah yang secara lebih teknis dikeluarkan oleh Kemdikbud dengan Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Dalam penerapannya Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal sudah tidak sesuai dengan dinamik kebutuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga diganti dengan Permendagri 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal.

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis

pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. Capaian SPM pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Capaian Standar Pelayanan Minimal PAUD

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	%
Jumlah yang Harus Dilayani :	5,348	5,018	330	94 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
Jenis Mutu Barang/Jasa Yang Harus Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
1. Buku gambar	4,240	4,240	0	100.00 %
2. Penyediaan biaya personil Peserta Didik	0	0	0	0 %
3. Alat mewarnai	4,240	4,240	0	100.00 %
4. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	122	95	27	77.87 %
5. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	414	302	112	72.95 %

Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	%
Jumlah yang Harus Dilayani :	25,560	25,490	70	100 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
Jenis Mutu Barang/Jasa Yang Harus Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
1. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	158	147	11	93.04 %
2. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	349	344	5	98.57 %
3. Buku teks pelajaran	25,490	25,490	0	100.00 %
4. Perlengkapan belajar	3,957	3,957	0	100.00 %
5. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1,189	1,189	0	100.00 %

6. Penyediaan biaya personil peserta didik	3,957	3,957	0	100.00 %
7. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1,761	1,761	0	100.00 %
8. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	158	148	10	93.67 %

Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	%
Jumlah yang Harus Dilayani :	230	214	16	93 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
Jenis Mutu Barang/Jasa Yang Harus Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	%
1. Modul belajar	214	214	0	100.00 %
2. Penyediaan biaya personil peserta didik	214	0	214	0 %
3. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	37	30	7	81.08 %
4. Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	0	0	0	0 %
5. Perlengkapan belajar	214	214	0	100.00 %
6. PKBM Terakreditasi minimal C	3	2	1	66.67 %
7. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	3	2	1	66.67 %
8. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	3	3	0	100.00 %

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran sasaran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Adapun beberapa tujuan dibalik pembuatan indikator tersebut adalah:

- Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir.

Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi tersebut, utamanya kinerja para karyawan.

- Untuk mendapatkan informasi penting soal kinerja karyawan selama ini. Nantinya, informasi tersebut akan dijadikan salah satu pedoman dalam menyusun manajemen kerja yang baik.

Dalam penyusunannya, IKU harus memenuhi sejumlah kriteria, utamanya kriteria dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kriteria-kriteria tersebut adalah:

1. *Spesifik*: indikator kinerja utama harus dibuat sespesifik mungkin dan juga harus mengacu pada hal yang akan diukur oleh indikator tersebut (dalam hal ini kinerja karyawan dan instansi terkait). Hal tersebut dilakukan agar orang-orang yang hendak menyusun IKU mempunyai persepsi yang sama terkait IKU yang mereka buat.
2. *Measurable*: IKU harus dapat diukur secara objektif, entah itu dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.
3. *Achievable*: data yang dipakai dalam IKU haruslah dapat dikumpulkan oleh pihak instansi terkait.
4. *Relevant*: IKU yang dibuat harus bisa menggambarkan kinerja sebuah instansi secara akurat dan relevan dengan kondisi riil instansi tersebut.
5. *Timelines*: IKU yang telah disusun harus bisa menggambarkan data berupa perkembangan kinerja suatu instansi dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, sedapat mungkin IKU bisa lebih fleksibel kalau nanti ada sejumlah perubahan di dalamnya.

Berikut ini adalah gambaran target dan Capaian Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung dalam kurun waktu 2018-2023.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung (Pada Renstra Awal Tahun 2018-2023)

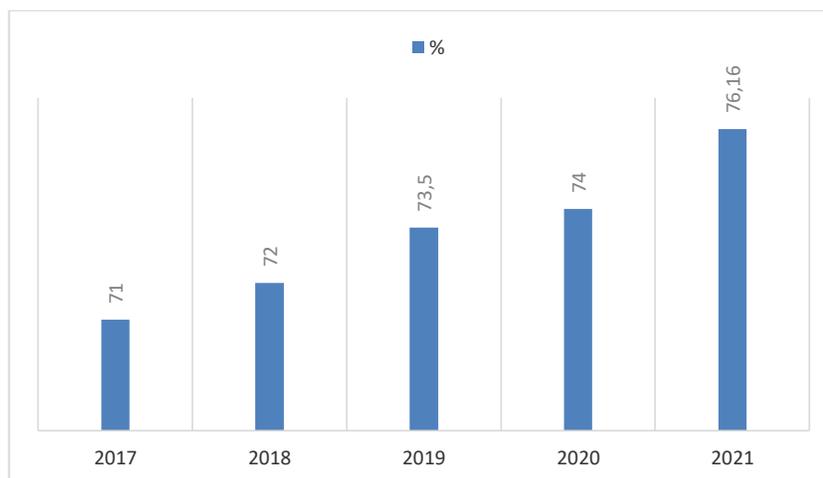
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun Ke					Realisasi Capaian tahun Ke-					Rasio Capaian tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
A	Meningkatnya Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan di Kabupaten Klungkung																		
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APM)(%)	100,00	100,00	-	73,50	74,00	76,16	100,00	100,00	73,50	74,00	76,16	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APK)(%)	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B (%)	71,01	71,01	-	62,31	64,49	66,67	68,84	71,01	62,31	64,49	66,67	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-
4	Proporsi PTK Bersertifikat dari PPG (%)	61,00	61,00	-	57,00	58,00	59,21	60,00	61,00	57,00	58,00	59,21	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-
5	Rasio pengawas/penilik PAUD (%)	50%	50%	-	43%	43%	43%	43%	50%	43%	43%	43%	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-
6	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (nilai)	1,82	1,82	-	1,78	1,79	1,80	1,81	1,82	1,78	1,79	1,80	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-
7	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional (nilai)	1,88	1,88	-	1,84	1,85	1,86	1,87	1,88	1,84	1,85	1,86	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-
8	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (nilai)	1,65	1,65	-	1,61	1,62	1,63	1,64	1,65	1,61	1,62	1,63	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-
9	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional (nilai)	1,69	1,69	-	1,65	1,66	1,67	1,68	1,69	1,65	1,66	1,67	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-
B	Meningkatnya Jumlah Pemuda dan Atlet yang Berprestasi Di Tingkat Provinsi dan Nasional																		
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	6,69%	6,69%	-	N/A	N/A	N/A	6,69%	6,69%	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	-	-
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	0,05%	0,05%	-	N/A	N/A	N/A	0,05%	0,05%	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	-	-
3	Peningkatan prestasi olahraga (medali emas)	12	12	-	0	1	13	12	12	0	1	13	-	-	0	1	13	-	-
C	Terwujudnya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi																		
1	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (nilai)	28,00	28,00	-	25,89	25,89	26,96	27,50	28,00	25,89	25,89	26,96	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-

A. Sasaran I Meningkatnya Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan di Kabupaten Klungkung

Sasaran ini ditetapkan untuk melaksanakan tujuan pembangunan urusan pendidikan daerah. Sasaran ini meliputi 3 aspek yaitu akses, mutu dan tata kelola pendidikan yang ukuran keberhasilannya atau indikator kinerjanya dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Anak Usia Dini (APS)(%)

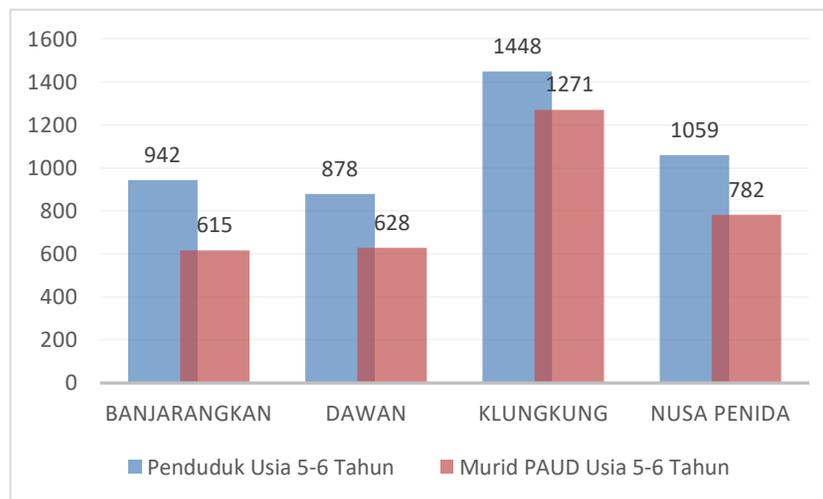
Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat ketercapaian akses pendidikan utamanya pendidikan anak usia dini. Indikator ini menggambarkan Rasio antara peserta didik usia 5-6 tahun (Dapodik) dengan populasi penduduk usia 5-6 tahun berdasarkan proyeksi populasi (BPS). Indikator ini juga meninjau kinerja pemerintah daerah dalam mendorong dukungan akses ke PAUD untuk anak usia 5-6 tahun di kota/kabupaten sebagai dasar perencanaan kebijakan di kota/kabupaten ke depannya. Partisipasi satu tahun prasekolah merupakan target yang termaktub di dalam Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang SPM, RAN PAUDHI, dan SDG Desa.



Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa Kinerja pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi anak usia 5-6 tahun untuk mengikuti layanan pendidikan melalui kelembagaan cukup baik dalam kategori menengah. Jika ditelisik lebih dalam perbandingan antara peserta didik usia 5-6 tahun (Dapodik) dengan populasi penduduk usia 5-6 tahun berdasarkan proyeksi populasi (BPS) dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	Kecamatan	Penduduk Usia 5-6 Tahun	Siswa PAUD Usia 5-6 Tahun	%
1	Banjarangkan	942	615	65,27%
2	Dawan	878	628	71,53%
3	Klungkung	1448	1271	87,75%
4	Nusa Penida	1059	782	73,84%
JUMLAH		4328	3296	76,16%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator ini tergolong rendah, jika dikaitkan dengan target SPM yang mewajibkan capaian indikator angka partisipasi PAUD sebesar 100%.



Turunan dari indikator jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini dapat dilihat pada tabel berikut :

Nama Indikator	Nilai	Capaian
Angka Kesiapan Sekolah	55%	Menengah
Angka Partisipasi Kasar (3-6)	50.34%	Menengah
Angka Partisipasi Murni (3-6)	49.2%	Menengah
Angka Partisipasi Murni (3-4)	6.93%	Rendah
Angka Partisipasi Murni di PAUD Negeri (3-6)	23.85%	Menengah
Angka Partisipasi Murni di PAUD Negeri (3-4)	17.06%	Menengah
Angka Partisipasi Murni di PAUD Negeri (5-6)	25.74%	Menengah
Kesenjangan Akses PAUD Berdasarkan Kelompok Gender	0.99	Rendah
Kesenjangan angka partisipasi anak usia 3-4 tahun antarkelompok gender	1.13	Tinggi
Kesenjangan angka partisipasi anak usia 5-6 tahun antarkelompok gender	0.95	Rendah

Sumber <https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id>

2. Jumlah Anak Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (APK)(%)

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat ketercapaian akses pendidikan utamanya pendidikan dasar. Indikator ini menggambarkan jumlah peserta didik di jenjang SD dan SMP sederajat dibagi jumlah penduduk usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas)

tahun pada kab/kota yang bersangkutan. Indikator ini digunakan untuk meninjau kinerja pemerintah daerah dalam mendorong dukungan akses ke SD dan SMP untuk anak usia 7-15 tahun di kota/kabupaten sebagai dasar perencanaan kebijakan di kota/kabupaten ke depannya.

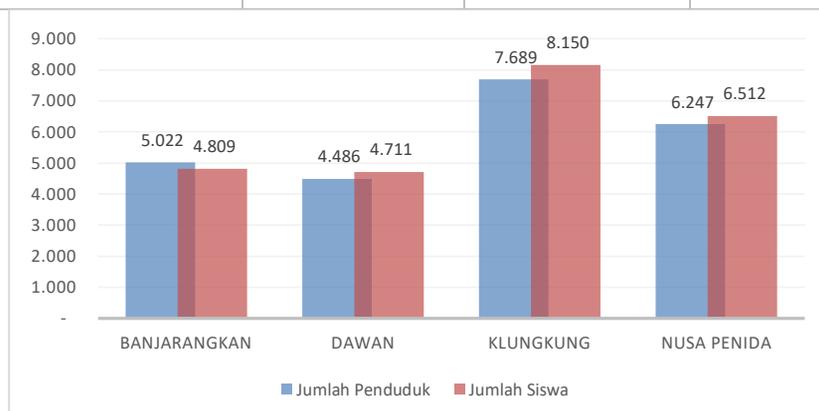


Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa

- Proporsi peserta didik pada jenjang SD sederajat terhadap penduduk kelompok usia 7-12 tahun di wilayah Kabupaten Klungkung sangat tinggi dengan predikat ketuntasan Paripurna.
- Proporsi peserta didik pada jenjang SMP sederajat terhadap penduduk kelompok usia 13-15 tahun di wilayah Kabupaten sangat tinggi dengan predikat ketuntasan Paripurna meskipun jika dilihat pada data tahun 2021 yang capainnya dibawah 100%.

Perbandingan persentase tersebut jika dilihat dari data jumlah siswa dan data penduduk tergambar pada tabel berikut :

No	Kecamatan	Penduduk Usia 13-15 Tahun	Murid SMP Usia 13-15 Tahun	% APK Siswa 7-15 Tahun
1	Banjarangkan	5.022	4.809	95,75%
2	Dawan	4.486	4.711	105,01%
3	Klungkung	7.689	8.150	106,00%
4	Nusa Penida	6.247	6.512	104,25%
JUMLAH		23.444	24.182	103,15%



Dari data diatas diketahui bahwa distribusi jmlah penduduk yang bersekolah di SD dan SMP lebih dari 100%, yang mengindikasikan seluruh penduduk usia 7-15 tahun telah bersekolah di SD dan SMP namun pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas masih perlu ditingkatkan sehingga masyarakat tidak perlu mencari sekolah hingga keluar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.

Turunan dari indikator jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator turunan jenjang SD

Nama Indikator	Nilai	Capaian
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A/SDLB	104.16%	Paripurna
APK berdasarkan kelompok gender	-2.2	Mendekati Seimbang
APK murid disabilitas	3.85%	Pratama
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	95.32%	Paripurna
APM per kelompok gender	-2.89	Mendekati Seimbang
APM murid disabilitas	92.16%	Madya

Sumber <https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id>

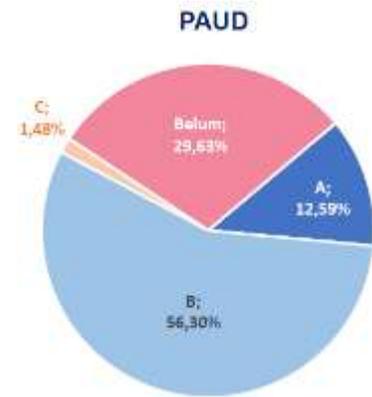
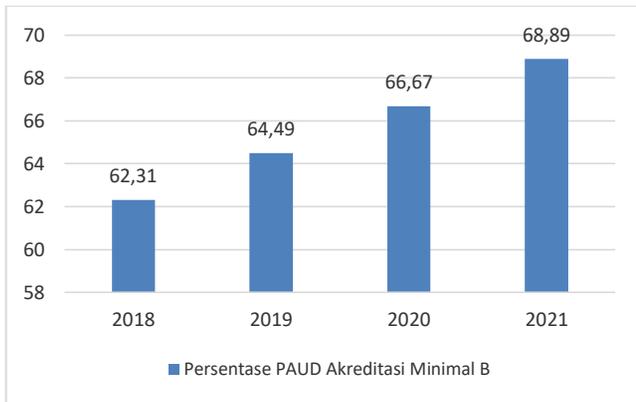
Indikator turunan jenjang SMP

Nama Indikator	Nilai	Capaian
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B/SMPLB	97.02%	Paripurna
APK berdasarkan kelompok gender	-3.62	Mendekati Seimbang
APK murid disabilitas	0%	Pratama
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B/SMPLB	72.49%	Pratama
APM per kelompok gender	-2.58	Mendekati Seimbang
APM murid disabilitas	78.99%	Pratama

Sumber <https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id>

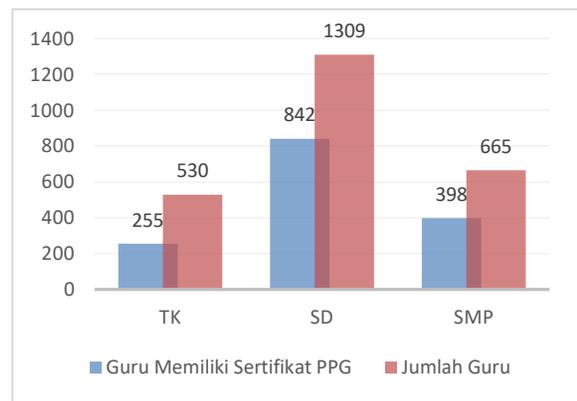
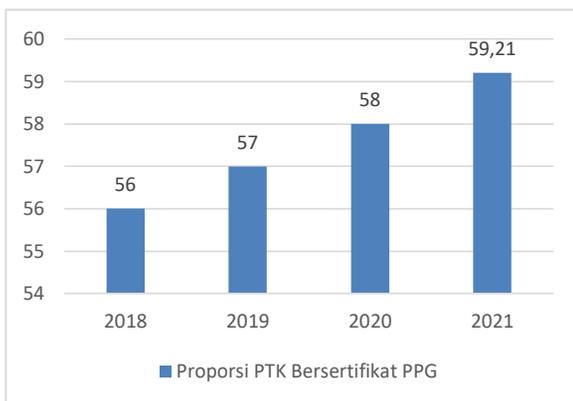
3. Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat ketercapaian tata kelola pendidikan utamanya pendidikan anak usia dini karena jenjang ini masih tertinggal dari jenjang lainnya. Indikator ini digunakan untuk meninjau kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah satuan yang terakreditasi minimal B sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam mendampingi satuan PAUD untuk meningkatkan kualitasnya. Pertambahan jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B di kota/kabupaten dihitung setiap tahun menunjukkan perkembangan kearah yang lebih baik :



4. Proporsi PTK Bersertifikat dari PPG (%)

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat ketercapaian tata kelola pendidikan, guru adalah salah satu sumber daya untuk melaksanakan tata kelola pendidikan yang baik. Definisi dari indikator ini adalah perbandingan antara jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kepala Satuan) yang terdaftar di satuan pendidikan dan memiliki sertifikat PPG dibagi dengan total pendidik dan tenaga kependidikan (Kepala Satuan) yang terdaftar di satuan pendidikan yang ada pada suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk mendapatkan informasi jumlah PTK bersertifikat PPG. Untuk di Kabupaten Klungkung capaian indikator Proporsi PTK yang memiliki sertifikat PPG relatif sedang, namun pekungannya setiap tahun menuju kearah yang lebih baik.



5. Rasio Pengawas/Penilik PAUD (%)

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat ketercapaian tata kelola pendidikan utamanya pada jenjang PAUD. Indikator ini digunakan untuk menghiung jumlah pengawas sekolah untuk TK ditambah jumlah penilik PAUD nonformal, dibagi jumlah satuan PAUD yang memiliki peserta didik berusia 5-6 tahun selain itu indikato ini juga digunakan untuk meninjau peran pemerintah daerah dalam mendukung pemerataan distribusi pengawas agar dapat mendampingi satuan pendidikan

utamanya satuan pendidikan PAUD. Capaian Kabupaten Klungkung untuk indikator ini masih rendah, dengan data sebagai berikut :

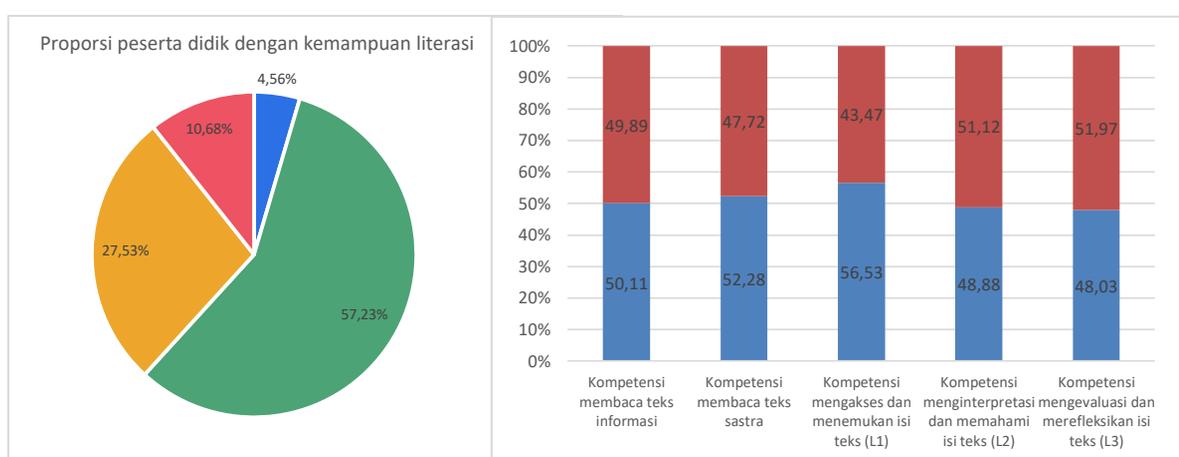
Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Pengawas/Penilik	Rasio
Banjarangkan	40	2	1 : 20
Dawan	25	2	1 : 13
Klungkung	44	1	1 : 44
Nusa Penida	30	1	1 : 30
Jumlah	139	6	1 : 14

Rasio ideal pengawas sekolah adalah 1 : 10 (1 orang pengawas : 10 satuan pendidikan PAUD). Dari kondisi yang tertera pada tabel jumlah pengawas/penilik PAUD yang ideal di Kabupaten Klungkung adalah 14 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Klungkung baru bisa menyediakan 43% pengawas/penilik PAUD.

6. Rata-Rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional (nilai) Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat ketercapaian mutu pendidikan. Indikator ini mengukur indeks capaian peserta didik jenjang SD berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Capaian tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Nama Indikator	Nilai	Capaian	Perbandingan			Rentang Nilai
			Kab/Kota serupa di nasional	Rata-Rata di provinsi	Rata-Rata nasional	
Kemampuan literasi	1.8	Mencapai kompetensi minimum	1.66	1.82	1.68	1 - 3
Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir	4.56%	Mahir				0 - 100
Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Cakap	57.23%	Cakap				0 - 100
Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Dasar	27.53%	Dasar				0 - 100
Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Perlu Intervensi Khusus	10.68%	Perlu Intervensi Khusus				0 - 100
Kompetensi membaca teks informasi	50.11		44.66	51.29	45.35	0 - 100
Kompetensi membaca teks sastra	52.28		44.88	52.95	45.67	0 - 100
Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks (L1)	56.53		50.85	57.49	51.56	0 - 100
Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks (L2)	48.88		42.05	49.45	42.76	0 - 100
Kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks (L3)	48.03		42.39	48.7	42.96	0 - 100

Sumber <https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id>



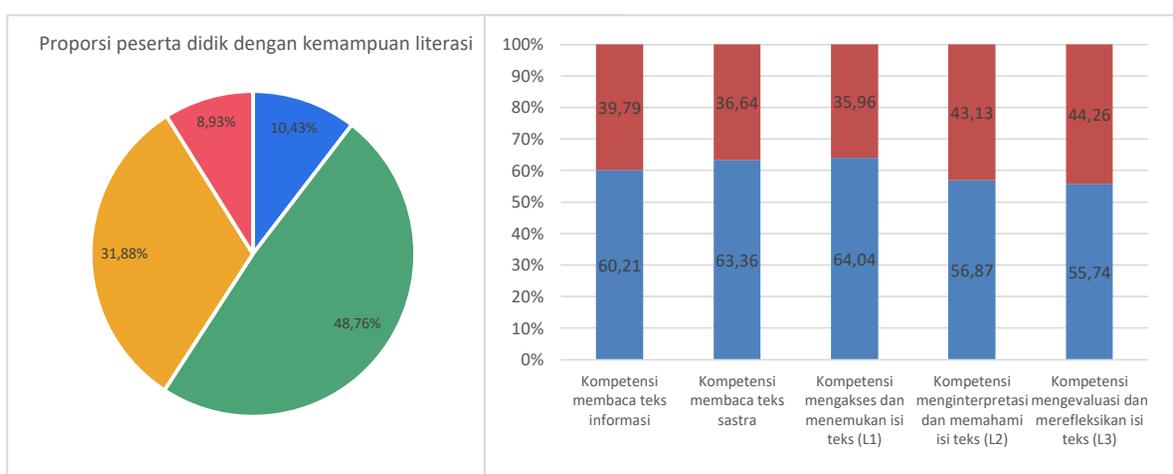
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa indeks kemampuan literasi siswa SD Kabupaten Klungkung sebesar 1,8 dan sudah mencapai komptensi minimum namun ada 10,68% dari jumlah siswa SD yang perlu intervensi secara khusus. Kompetensi literasi yang perlu ditingkatkan adalah menginterpretasi dan memahami isi teks serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks.

7. Rata-Rata Kemampuan Literasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional (nilai)

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat ketercapaian mutu pendidikan. Inikator ini mengukur indeks capaian peserta didik jenjang SMP berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Capaian tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Nama Indikator	Nilai	Capaian	Perbandingan			Rentang Nilai
			Kab/Kota serupa di nasional	Rata-Rata di provinsi	Rata-Rata di nasional	
Kemampuan literasi	1.86	Mencapai kompetensi minimum	1.68	1.88	1.7	1 - 3
Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir	10.43%	Mahir				0 - 100
Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Cakap	48.76%	Cakap				0 - 100
Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Dasar	31.88%	Dasar				0 - 100
Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Perlu Intervensi Khusus	8.93%	Perlu Intervensi Khusus				0 - 100
Kompetensi membaca teks informasi	60.21	Belum Tersedia	53.97	61.33	54.49	0 - 100
Kompetensi membaca teks sastra	63.36	Belum Tersedia	57.5	64.41	58.23	0 - 100
Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks (L1)	64.04	Belum Tersedia	58.32	64.92	58.92	0 - 100
Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks (L2)	56.87	Belum Tersedia	51.25	58.24	51.82	0 - 100
Kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks (L3)	55.74	Belum Tersedia	50.26	57.09	50.85	0 - 100

Sumber <https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id>



Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa indeks kemampuan literasi siswa SMP Kabupaten Klungkung sebesar 1,86 dan sudah mencapai kompetensi minimum namun ada 8.93% dari jumlah siswa SMP yang perlu intervensi secara khusus. Kompetensi numerasi yang perlu ditingkatkan adalah menginterpretasi dan memahami isi teks serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks.

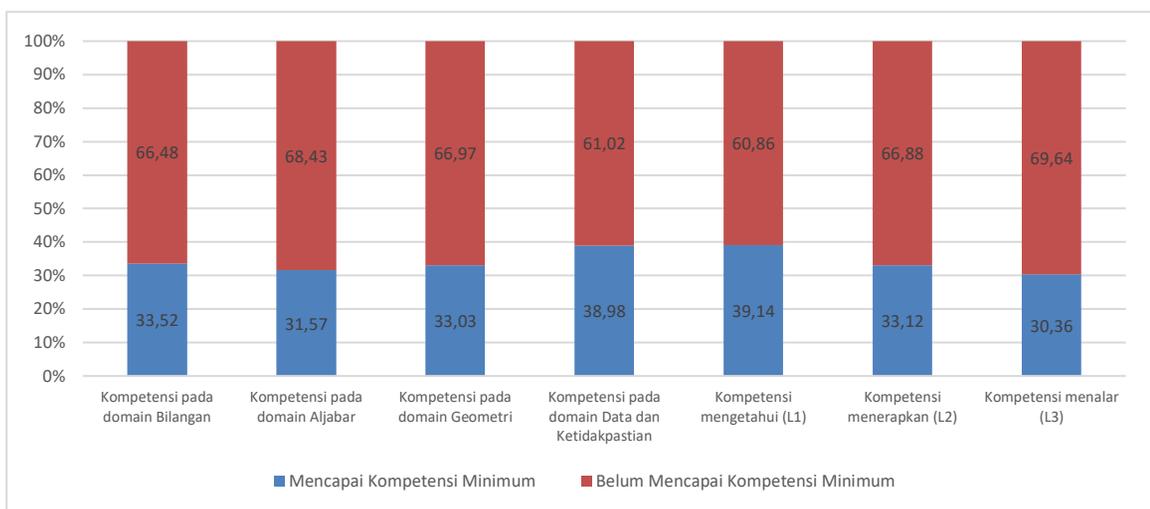
8. Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional (nilai)

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat ketercapaian mutu pendidikan. Indikator ini mengukur indeks kemampuan peserta didik jenjang SD berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Di Kabupaten Klungkung capaian indikator ini adalah kurang dari 50% peserta didik jenjang SD telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. Capaian tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Nama Indikator	Nilai	Capaian	Perbandingan Rentang Nilai			Rentang Nilai
			Kab/Kota serupa di nasional	Rata-Rata di provinsi	Rata-Rata di nasional	
Kemampuan numerasi	1.63	Di bawah kompetensi minimum	1.53	1.65	1.54	1 - 3
Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir	2.5%	Mahir				0 - 100
Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Cakap	32.38%	Cakap				0 - 100
Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Dasar	50.9%	Dasar				0 - 100
Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Perlu Intervensi Khusus	14.21%	Perlu Intervensi Khusus				0 - 100
Kompetensi pada domain Bilangan	33.52		30.7	34.17	31.15	0 - 100
Kompetensi pada domain Aljabar	31.57		28.69	32.38	29.12	0 - 100
Kompetensi pada domain Geometri	33.03		29.66	33.53	30.03	0 - 100
Kompetensi pada domain Data dan Ketidakpastian	38.98		34.94	39.89	35.38	0 - 100
Kompetensi mengetahui (L1)	39.14		35.74	40.54	36.28	0 - 100
Kompetensi menerapkan (L2)	33.12		29.53	33.66	29.95	0 - 100
Kompetensi menalar (L3)	30.36		27.29	30.56	27.64	0 - 100

Sumber <https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id>





Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa indeks kemampuan numerasi siswa SD Kabupaten Klungkung sebesar 1,63 dibawah kompetensi minimum, ada sekitar 14,21% dari jumlah siswa SD yang perlu intervensi secara khusus.

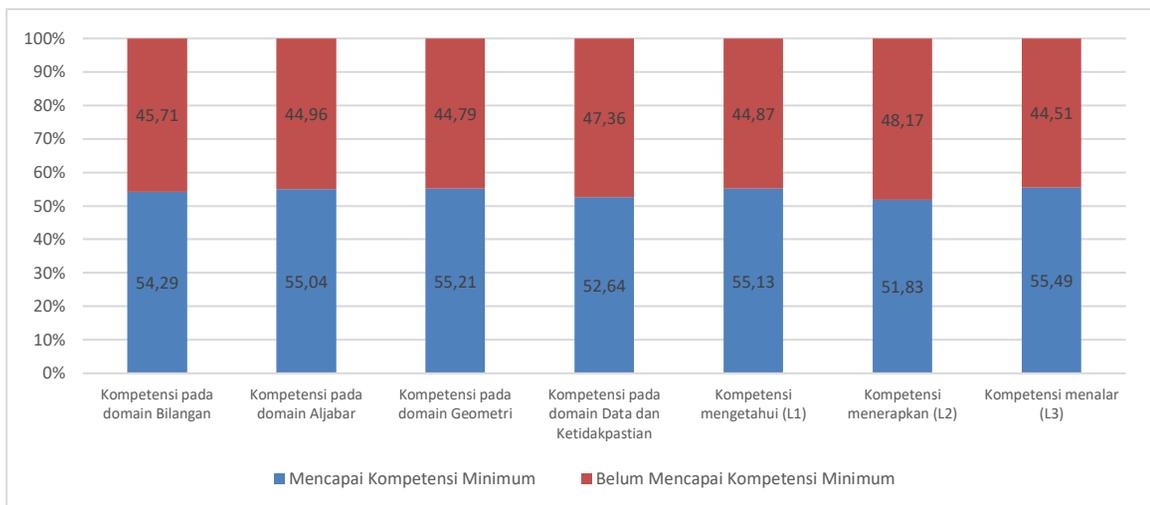
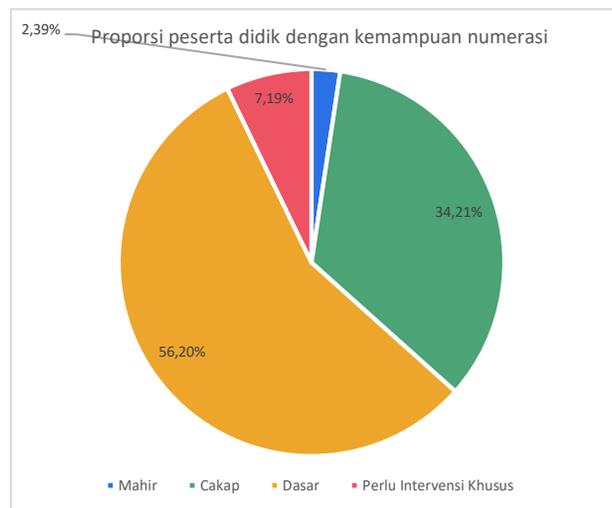
9. Rata-Rata Kemampuan Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional (nilai)

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat ketercapaian mutu pendidikan. Indikator ini mengukur indeks kemampuan peserta didik jenjang SD berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Di Kabupaten Klungkung capaian indikator ini adalah kurang dari 50% peserta didik jenjang SD telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. Capaian tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Nama Indikator	Nilai	Capaian	Perbandingan Rentang Nilai			Rentang Nilai
			Kab/Kota serupa di nasional	Rata-Rata di provinsi	Rata-Rata di nasional	
Kemampuan numerasi	1.67	Di bawah kompetensi minimum	1.63	1.73	1.64	1 - 3
Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir	2.39%	Mahir				0 - 100

Nama Indikator	Nilai	Capaian	Perbandingan Rentang Nilai			Rentang Nilai
			Kab/Kota serupa di nasional	Rata-Rata di provinsi	Rata-Rata di nasional	
Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Cakap	34.21%	Cakap				0 - 100
Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Dasar	56.2%	Dasar				0 - 100
Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Perlu Intervensi Khusus	7.19%	Perlu Intervensi Khusus				0 - 100
Kompetensi pada domain Bilangan	54.29		53.75	55.31	53.93	0 - 100
Kompetensi pada domain Aljabar	55.04		53.45	55.13	53.56	0 - 100
Kompetensi pada domain Geometri	55.21		54.03	55.35	54.12	0 - 100
Kompetensi pada domain Data dan Ketidakpastian	52.64		51.65	53.48	51.82	0 - 100
Kompetensi mengetahui (L1)	55.13		54.27	55.83	54.46	0 - 100
Kompetensi menerapkan (L2)	51.83		50.52	52.62	50.71	0 - 100
Kompetensi menalar (L3)	55.49		54.4	55.89	54.51	0 - 100

Sumber <https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id>



Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa indeks kemampuan numerasi siswa SMP Kabupaten Klungkung sebesar 1,67 dibawah kompetensi minimum, ada sekitar 7.19% dari jumlah siswa SMP yang perlu intervensi secara khusus.

B. Sasaran II Meningkatnya Jumlah Pemuda dan Atlet yang Berprestasi Di Tingkat Provinsi dan Nasional

Sasaran ini ditetapkan untuk melaksanakan tujuan pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga daerah. Untuk dapat mengukur keberhasilan sasaran ini, telah ditetapkan 3 indikator sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)

Pada Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan kompetensi pemuda. Di Kabupaten Klungkung terdapat beberapa organisasi pemuda yang aktif melaksanakan kegiatan pembangunan kepmudaan antara lain :

- a. Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Klungkung
- b. Purna Paskibraka Kabupaten Klungkung
- c. Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Klungkung yang membawahi beberapa unit organisasi kepemudaan lainnya antara lain :
 - Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia
 - Banteng Muda Indonesia
 - Pemuda Demokrat Indonesia
 - Gerakan Pemuda Ansor
 - Pemuda Panca Marga

2. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)

Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan salah satu bidang pembangunan pemuda yaitu sumberdaya ekonomi dengan tujuan meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi. Berbekal pemahaman kemandirian ekonomi beberapa pemuda di Kabupaten Klungkung telah berhasil mengembangkan kegiatan ekonomi secara mandiri.

3. Peningkatan prestasi olahraga (medali emas)

Perkembangan prestasi olahraga Kabupaten Klungkung juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik, setelah hampir 2 tahun tidak ada even olahraga yang diikuti, tahun 2021 beberapa atlet Kabupaten Klungkung berhasil menorehkan prestasi di ajang Reional dan Nasional. Berikut data perolehan medali pada tahun 2021 :

NO	NAMA	MEDALI	PRESTASI	CABOR	JENIS KEJUARAAN
1	Ni Kadek Ena Dwi Ratna Pratiwi	Emas	Juara 1 Kompetisi Virtual dilaksanakan Bulan Nopember 2021	Pencak Silat	Kompetisi Silat Virtual Tingkat Nasional Rajawali Championship League

NO	NAMA	MEDALI	PRESTASI	CABOR	JENIS KEJUARAAN
2	Komang Nanda Pramiswari	Emas	Juara 1 Kompetisi Virtual dilaksanakan Bulan Januari 2021	Pencak Silat	Kompetisi Silat Virtual Tingkat Nasional Rajawali Championship League
3	Ni Kadek Ena Dwi Ratna Pratiwi	Emas	Juara 1 Kompetisi Virtual dilaksanakan Bulan Januari 2021	Pencak Silat	Kompetisi Silat Virtual Tingkat Nasional Rajawali Championship League
4	I Pande Wayan Arta Nuada	Emas	Juara 1 Petanque Nomor Shooting Freestyle Putra	Petanque	Pekan Prestasi Masaiswa Nasional (Fantasi) 2021
5	Ni Putu Okta Diana Dewi	Emas	Juara I Baseball Putri	Baseball	Kejurna Baseball Putri Indonesia 2021
6	Ni kadek Putri Wulan	Emas	Juara 1 100 M Surface KU-E Putri	Selam	Kejurna Finswimming Antar Kota/Kabupaten se-Indonesia Piala Gubernur Jawa Timur VII Tahun 2021
7	Tian Honan Wijaya	Emas	Juara 1 Boys Qiang Shu Group C	Wushu	Sirkuit Nasional Wushu Taolu 2021 Final Stage
8	Cecilia Celina Wijaya	Emas	Juara 1 Girl Taiji Quan Junior A	Wushu	Sirkuit Nasional Wushu Taolu 2021 Stage 2
9	Tian Honan Wijaya	Emas	Juara 1 Qiangshu C Putra	Wushu	Unhan RI Multisport Championship 2021
10	Tian Honan Wijaya	Emas	Juara 1 Jianshu C Putra	Wushu	Unhan RI Multisport Championship 2021
11	Kadek Santia Melani	Emas	Juara 1 Daoshu A Putri	Wushu	Unhan RI Multisport Championship 2021
12	Nalina Karunaditha Hartawan	Emas	Juara 1 Qiangshu B Putri	Wushu	Unhan RI Multisport Championship 2021
13	Melanie Wijaya	Emas	Juara 1 Nanquan C Putri	Wushu	Unhan RI Multisport Championship 2021
14	I Gede Agus Priandana	Emas	Juara 1 Super Six Cabor Cricket PON Papua	Cricket	PON Papua 2021
15	I Ketut Edy Guna Artawa	Emas	Juara 1 Super Six Cabor Cricket PON Papua	Cricket	PON Papua 2021
16	Cok Istri Agung Sanistyarani	Emas	Juara 1 Kumite -55 Kg Putri	Karate	PON Papua 2021
17	I Wayan Eko Buana Putra	Emas	Juara 1 Freestyle Putra	Kabaddi	PON Papua 2021
18	I Kadek Dodi Indrawan	Emas	Juara 1 Freestyle Putra	Kabaddi	PON Papua 2021
19	I Komang Widhiana P.P	Emas	Juara 1 Freestyle Putra	Kabaddi	PON Papua 2021
20	Ine Ayu Ashari	Emas	Juara 1 Freestyle Putri	Kabaddi	PON Papua 2021
21	Ni Luh Putu Widhayani	Emas	Juara 1 Freestyle Putri	Kabaddi	PON Papua 2021
22	Pande Gede Suardinata	Perak	Juara 2 Kompetisi Virtual dilaksanakan Bulan Nopember 2021	Pencak Silat	Kompetisi Silat Virtual Tingkat Nasional Rajawali Championship League
23	I Dewa Gede Eka Pranata Juniantara	Perak	Juara 2 Baseball U-18 Putra	Baseball	Kejurnas Baseball U-15 dan U-18 2021
24	I Wayan Dharma Wiguna	Perak	Juara 2 Baseball U-18 Putra	Baseball	Kejurnas Baseball U-15 dan U-18 2021
25	Deviyanti Nur	Perak	Juara 2 Ganda Putri	Tenis Meja	BNN RI table Tennis Indonesia Invitation 2021
26	Melanie Wijaya	Perak	Juara 2 Girl Nan Quan Junior C	Wushu	Sirkuit Nasional Wushu Taolu 2021 Stage 2
27	Melanie Wijaya	Perak	Juara 2 Girl Nan Quan Group C	Wushu	Sirkuit Nasional Wushu Taolu 2021 Final Stage
28	Najwa Safa Salsabila	Perak	Juara 2 Daoshu B Putri	Wushu	Unhan RI Multisport Championship 2021

NO	NAMA	MEDALI	PRESTASI	CABOR	JENIS KEJUARAAN
29	Anasera Zahraa Haryoso	Perak	Juara 2 Qiangshu C Putri	Wushu	Unhan RI Multisport Championship 2021
30	Kadek Santia Melani	Perak	Juara 2 Changquan A Putri	Wushu	Unhan RI Multisport Championship 2021
31	Kadek Surya Pebriantari	Perak	Juara 2 Gyorugi Walter Under 67 Kg Putri	Taekwondo	PON Papua 2021
32	Pande Kadek Agus Suardiawan	Perunggu	Juara 2 Kompetisi Virtual dilaksanakan Bulan Nopember 2021	Pencak Silat	Kompetisi Silat Virtual Tingkat Nasional Rajawali Champinship League
33	I Komang Teja Budiarta Adnyana	Perunggu	Juara 2 Kompetisi Virtual dilaksanakan Bulan Nopember 2021	Pencak Silat	Kompetisi Silat Virtual Tingkat Nasional Rajawali Champinship League
34	Ni Kadek Melati	Perunggu	Juara 3 Double Women	Petanque	Year End IV Open Petanque Competition Tingkat Nasional
35	Ni Putu Vivin Widyadari	Perunggu	Juara 3 Double Women	Petanque	Year End IV Open Petanque Competition Tingkat Nasional
36	Ni Ketut Desy Rinjani Sari	Perunggu	Juara 3 Double Women	Petanque	Kejuaraan Nasional Mahasiswa 2021
37	Ketut Risky Ernawati	Perunggu	Juara 3 Ganda Dewasa Putri	Bulutangkis	Kejuaraan Bulutangkis Singaraja Open 2021
38	Yusril Bagas Dewantara	Perunggu	Juara 3 800 m Surface KU A Putr	Selam	Kejurna Finswimming Antar Kota/Kabupaten se-Indonesia Piala Gubernur Jawa Timur VII Tahun 2021
39	Deviyanti Nur	Perunggu	Juara 3 Double Putri Umum	Tenis Meja	Kejuaraan Tennis Meja Kepala BNN RI CUP 2021
40	Kadek Santia Melani	Perunggu	Juara 3 Girl Gun Shu Group A	Wushu	Sirkuit Nasional Wushu Taolu 2021 Final Stage
41	Kadek Santia Melani	Perunggu	Juara 3 Girl Dao Shu Group A	Wushu	Sirkuit Nasional Wushu Taolu 2021 Final Stage
42	Kadek Santia Melani	Perunggu	Juara 3 Girl Gun Shu Junior A	Wushu	Sirkuit Nasional Wushu Taolu 2021 Stage 2
43	Tian Honan Wijaya	Perunggu	Juara 3 Boys Qiang Shu Junior C	Wushu	Sirkuit Nasional Wushu Taolu 2021 Stage 2
44	Nalina Karunaditha Hartawan	Perunggu	Juara 3 Jianshu B Putri	Wushu	Unhan RI Multisport Championship 2021
45	Ni Made Nada Dwimayanti	Perunggu	Juara 3 Kumite-68 Kg Putri	Karate	PON Papua 2021
46	I Wayan Sumertayasa	Perunggu	Juara 3 Kelas H Putra	Pencak Silat	PON Papua 2021

Tabel T-C24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Klungkung

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Kesekretariatan	5,460,564,235	2,642,633,550	5,318,853,104	2,366,390,749	97.40	89.55	-51.61	-7.86
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	742,690,475	733,380,158	688,046,926	666,427,026	92.64	90.87	-1.25	-1.77
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	4,427,536,376	1,811,199,672	4,356,194,668	1,601,957,843	98.39	88.45	-59.09	-9.94
Pengelolaan Kearsipan	4,930,000	1,223,000	4,870,000	1,223,000	98.78	100.00	-75.19	1.22
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	73,843,059	11,822,060	68,694,680	11,822,060	93.03	100.00	-83.99	6.97
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	103,394,210	36,797,710	98,401,720	36,795,210	95.17	99.99	-64.41	4.82
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	108,170,115	48,210,950	102,645,110	48,165,610	94.89	99.91	-55.43	5.01
Program Pendidikan Anak Usia Dini	5,193,097,700	6,716,611,755	4,407,134,496	6,424,056,178	84.87	95.64	29.34	10.78
Pembangunan Gedung Sekolah	534,102,000	1,238,222,255	282,576,962	1,217,236,004	52.91	98.31	131.83	45.40
Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain	84,220,000	990,020,000	84,132,500	882,354,174	99.90	89.12	1075.52	-10.77
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	2,468,593,500	2,598,901,000	2,240,390,700	2,598,901,000	90.76	100.00	5.28	9.24
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	1,244,044,200	1,889,468,500	946,188,453	1,725,565,000	76.06	91.33	51.88	15.27
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	9,699,335,361	10,771,067,457	9,443,549,504	10,193,284,087	97.36	94.64	11.05	-2.73
Pembangunan Gedung Sekolah	4,571,389,540	4,406,251,382	4,535,494,783	4,249,831,205	99.21	96.45	-3.61	-2.76
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	534,842,300	2,025,479,450	501,161,625	2,025,354,250	93.70	99.99	278.71	6.29
Pengadaan Mebeluer Sekolah	1,008,000,000	1,651,372,000	1,002,108,497	1,650,339,000	99.42	99.94	63.83	0.52
Pelatihan Penyusunan Kurikulum	15,379,600	1,124,600	15,379,600	1,124,600	100.00	100.00	-92.69	0.00
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	495,000,000		488,500,000		98.69		-100.00	-98.69
Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	2,126,460,000	2,100,000,000	2,037,658,378	2,096,293,400	95.82	99.82	-1.24	4.00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar	152,901,786	426,195,125	133,961,786	9,752,732	87.61	2.29	178.74	-85.32
Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	490,235,600	118,725,000	450,110,400	118,725,000	91.82	100.00	-75.78	8.18
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	68,865,635	33,229,000	55,642,035	33,229,000	80.80	100.00	-51.75	19.20
Penyediaan Beasiswa Transisi	16,447,700	5,322,700	11,987,700	5,266,700	72.88	98.95	-67.64	26.06
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	219,813,200	3,368,200	211,544,700	3,368,200	96.24	100.00	-98.47	3.76
Program Pendidikan Non Formal	729,934,500	490,032,500	635,899,500	455,112,500	87.12	92.87	-32.87	5.76
Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	40,990,000	2,168,500	40,990,000	2,168,500	100.00	100.00	-94.71	0.00
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	164,264,000	87,464,500	149,332,000	85,464,500	90.91	97.71	-46.75	6.80
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	26,341,000	2,201,500	26,141,000	1,931,500	99.24	87.74	-91.64	-11.51
Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal	390,926,500	393,014,000	332,899,500	360,364,000	85.16	91.69	0.53	6.54
Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	47,119,000		26,503,000		56.25		-100.00	-56.25
Pengembangan Sertifikasi Pendidikan Non Formal	16,137,000	3,870,000	16,137,000	3,870,000	100.00	100.00	-76.02	0.00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	44,157,000	1,314,000	43,897,000	1,314,000	99.41	100.00	-97.02	0.59
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11,640,849,178		11,580,416,420		99.48		-100.00	-99.48
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	108,390,700		98,826,775		91.18		-100.00	-91.18
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	161,104,849		160,399,849		99.56		-100.00	-99.56
Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	11,203,398,896		11,170,195,988		99.70		-100.00	-99.70
Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	51,001,996		49,671,996		97.39		-100.00	-97.39
Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	116,952,737		101,321,812		86.63		-100.00	-86.63
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	23,912,991,963		23,400,029,478		97.85		-100.00	-97.85

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	23,912,991,963		23,400,029,478		97.85		-100.00	-97.85
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas		1,535,531,290		1,535,531,290		100.00		100.00
Kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD		1,534,225,309		1,534,225,309		100.00		100.00
Kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmas		1,305,981		1,305,981		100.00		100.00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas		13,644,313,772		13,502,743,441		98.96		98.96
Kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD		8,648,071,880		8,589,094,828		99.32		99.32
Kegiatan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP		4,996,241,892		4,913,648,613		98.35		98.35

Dari tabel di atas nampak bahwa penyerapan anggaran untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung Tahun 2020 bisa dikatakan baik karena jika dilihat secara keseluruhan rata-rata telah mencapai diatas angka 80%. Adapun faktor tercapainya target ini adalah adanya konsistensi penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018 dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) cukup baik yang terlihat dari kesesuaian program pada RPJMD dengan yang dirancang pada Renstra SKPD.

Namun meskipun demikian evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan Anggaran di tahun I dan ke II masih tetap perlu dilaksanakan. Dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut maka di peroleh beberapa rekomendasi antara lain sebagai beriku:

- a Untuk menjamin kesesuaian antara Renja, Renstra dan RPJMD perlu melakukan verifikasi Renstra Dinas Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b Agar realisasi pelaksanaan program/kegiatan dapat diukur dengan baik, PPTK direkomendasikan melakukan evaluasi capaian kinerja dan identifikasi kendala dan hambatan termasuk indikator kinerja .
- c Dalam identifikasi daya serap anggaran setiap triwulan sesuai dengan aliran kas, maka PPTK berkoordinasi dengan Pembantu Bendahara
- d Tertib pelaporan hasil evaluasi Renstra Dinas Pendidikan harus dilakukan tepat waktu, kesesuaian pengisian format, keakurasian data dan informasi
- e Demikian laporan hasil evaluasi terhadap Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung untuk dapat dijadikan bahan acuan dalam membenahan dan peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dalam mendukung tercapainya visi misi RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga melakukan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang merupakan identifikasi berbagai faktor yang secara sistematis digunakan untuk merumuskan suatu strategi. Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*), peluang (*Opportunities*) dan secara bersamaan meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Analisis SWOT terhadap lingkungan strategis pendidikan kepemudaan dan olahraga

dimaksudkan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang faktor-faktor lingkungan strategis pendidikan dan secara bersama meminimalkan kelemahan dan ancaman faktor-faktor lingkungan strategis pendidikan.

Output analisis SWOT diarahkan untuk menciptakan empat strategi yaitu menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman dan menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut:

Program	Permasalahan Pelayanan Dinas	Tantangan	Peluang
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah masyarakat umum yang datang untuk mendapatkan informasi terbaru	Jam layanan yang diberikan untuk menjawab kebutuhan informasi masyarakat masih perlu ditingkatkan	Penyediaan layanan help desk sehingga tidak mengganggu kinerja kantor, dengan SDM yang dibekali cukup pengetahuan akan halhal dasar terkait pendidikan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana ruangan yang memadai dan nyaman, dan peralatan yang mendukung berupa computer, printer, telp dsb	Setiap SDM belum memiliki computer dan tidak semua SDM mampu menggunakannya, penggunaan alat belum optimal	Peningkatan kapasitas SDM sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang belum mampu diselesaikan secara on time (real time report)	Jumlah kegiatan yang harus dilaksanakan tidak sebanding dengan jumlah SDM yang ada	Manajemen perkantoran dan penataan SDM sehingga setiap seksi/bidang dapat lebih maksimal dalam bekerja
Pengelolaan Pendidikan Dasar	Penambahan tugas dan fungsi sesuai bidang kewenangan yang tidak sesuai dengan jumlah SDM yang tersedia	Penyesuaian dan penyeimbangan antara SDM yang ada dengan beban dan jumlah pekerjaan yang ada melalui penataan pegawai	SDM yang berkualitas sehingga meskipun jumlah SDM dirasa kurang namun masih bisa mendukung dan melaksanakan kegiatan
	Pandemic Covid-19 yang menyebabkan sekolah harus ditutup dan untuk sementara tidak bisa digunakan dalam proses belajar mengajar tatap muka	Penyediaan sarana prasarana pembelajaran jarak jauh antara Guru dengan materi yang harus disiapkan serta siswa dengan peralatan yang harus dimiliki.	Alokasi anggaran yang difokuskan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh berupa langganan internet, pembelian kuota dan juga dimungkinkan untuk membangun sistem pembelajaran online di setiap sekolah sesuai kebutuhan
			Pembangunan sarana prasarana jaringan internet berupa server, menara maupun fiber optic sehingga mampu memberikan akses kepada sekolah yang berada

Program	Permasalahan Pelayanan Dinas	Tantangan	Peluang
			di daerah terpencil maupun perkotaan tanpa ada perbedaan kecepatan akses
		Penyesuaian dan penyeimbangan antara guru yang ada dengan kemampuan dan ketrampilan dalam penggunaan gadget dan penyusunan materi sesuai mata pelajaran yang diampu	Program kegiatan yang menasar peningkatan mutu, kualitas, kapasitas dan ketrampilan guru dalam menggunakan peralatan teknologi sebagai media pembelajaran
Pengelolaan Pendidikan PAUD dan Kesetaraan	Pemberian layanan pendidikan PAUD dan Kesetaraan untuk menjawab kebutuhan anak-anak usia PAUD dan Kesetaraan	Penyediaan sarana prasarana yang terus diupayakan agar terjangkau oleh masyarakat	Ketersediaan dana APBD untuk pemenuhan standar pelayanan pendidikan PAUD dan Kesetaraan
	Pandemic Covid-19 yang menyebabkan sekolah harus ditutup dan untuk sementara tidak bisa digunakan dalam proses belajar mengajar tatap muka	Penyesuaian dan penyeimbangan antara jumlah SDM PAUD dan Kesetaraan dalam artian pendampingan/ pembinaan baik melalui home visit, home care maupun pembelajaran jarak jauh	Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM, perbaikan sarana prasarana dan daya dukung terkait home visit, home care dan atau pembelajaran jarak jauh untuk pendidikan PAUD dan Kesetaraan
Peningkatan Mutu Pendidikan	Peningkatan mutu pendidikan dikdas paud dan kesetaraan sebagai wujud Kabupaten Layak Anak	Meningkatkan mutu dan kualitas dikdas paud dan kesetaraan sehingga mampu secara optimal dalam penyediaan layanan dan kebutuhan pendidikan yang bermutu dan berkualitas	Peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sarana prasarana dan daya dukung terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tidak semua PTK bisa mendapatkan sertifikat pendidik	Jenis mapel yang diajar dan jam mengajar yang tidak bisa diperoleh dari satu sekolah	Peningkatan koordinasi dan penataan guru mapel sehingga untuk mapel dengan jam mengajar sedikit dapat mendapat jam mengajar dari sekolah lain, dan jumlah guru yang mengajar mapel tersebut juga tidak terlalu banyak
	Jumlah PTK PNS yang semakin berkurang	Pendataan PTK yang dilakukan terkait dengan kelebihan dan kekurangan guru pada mapel tertentu, dan pengurangan PTK akibat pensiun	Penambahan SDM PTK dengan latar belakang pendidikan yang lebih sesuai dengan mapel yang diajarkan dan dibutuhkan oleh sekolah

Program	Permasalahan Pelayanan Dinas	Tantangan	Peluang
Layanan Pendidikan Kecamatan	Jarak antar sekolah dan dinas induk yang cukup jauh	Lamanya jarak tempuh yang dibutuhkan sehingga kadang menyulitkan pada saat dilakukan koordinasi dan membutuhkan tindakan yang cepat	Penggunaan sarana teknologi modern secara optimal untuk memudahkan koordinasi dan pemenuhan kebutuhan administrasi yang musti dilakukan secara cepat dan ontime
Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Belum semua satuan pendidikan menerapkan pembelajaran berbasis TIK	Meningkatkan jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	Pembelajaran TIK yang sudah disesuaikan dengan kurikulum dan mata pelajaran yang diinginkan tersedia dan dapat digunakan
Pembinaan Kepemudaan	Kesulitan dalam memenuhi capaian kinerja berupa laporan administrasi diakibatkan kendala dalam berkoordinasi dengan organisasi kepemudaan	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi untuk menanggulangi kesulitan baik dalam pelaksanaan jadwal kegiatan maupun pemenuhan kebutuhan laporan kegiatan fisik dan anggaran	Menekankan perlunya untuk menetapi jadwal kegiatan dan penyeteroran laporan kegiatan dikarenakan terkait dengan kinerja instansi yang harus dipertahankan dan ditingkatkan
Pembinaan Keolahragaan	Masih kurangnya minat masyarakat untuk sadar olahraga dan menggunakan fasilitas sarana prasarana olahraga yang sudah dibangun	Meningkatkan jumlah even keolahragaan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional	Sarana prasarana olahraga yang sudah memenuhi standar Nasional sehingga dapat menjadi ikon baru bahwa Klungkung juga sebagai pusat Olahraga dengan bibit-bibit atlet berbakat dengan kualitas nasional

Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Ancaman pengembangan pelayanan dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut:

Strength	Weakness
Kualitas SDM yang sebagian besar berlatar belakang pendidikan minimal S-1, sehingga kinerja dapat terlaksanakan dengan baik.	Masih ada SDM memiliki latar belakang pendidikan dibawah S1.
Hampir setengah SDM berusia 50 tahun kebawah	Sebagian SDM berusia 51 tahun keatas.
Memiliki tenaga kontrak dengan latar belakang pendidikan tinggi (S-1) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan program bidang pendidikan.	Beberapa pegawai telah memasuki usia pensiun dan terdapat peraturan yang melarang pengangkatan pegawai non PNS
Kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk jenjang pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan kesetaraan serta bidang kepemudaan dan olahraga	Kewenangan yang bertambah luas menambah beban tanggung jawab dan capaian pada masing-masing layanan pendidikan yang musti berubah, dirasa sulit dikarenakan perbedaan kemampuan dan kekuatan dari setiap sekolah
Kinerja pendidikan untuk kinerja pemerataan, mutu dan efisiensi rata-rata sebesar 84.79% untuk tahun 2021	Kinerja pendidikan yang dimungkinkan turun akibat adanya perubahan dan penambahan kewenangan.

Mutu layanan dan aksesibilitas pendidikan yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, ditunjukkan dengan semakin menurunnya jumlah siswa yang putus sekolah maupun mengulang.	Masih adanya siswa yang mengulang dan putus sekolah.
Kinerja pendidikan yang tergolong tinggi dengan rata rata layanan sebesar 84.79%	Kinerja layanan pendidikan yang masih belum mencapai 100%, sehingga memerlukan banyak perbaikan dan peningkatan mutu dan kualitas layanan pendidikan.
Opportunity	Threats
Hubungan yang baik antar Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota	Hubungan yang terjalin terkadang masih parsial dan sektoral dikarenakan adanya perbedaan kewenangan antara kewenangan Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota sehingga koordinasi tidak terjadi secara menyeluruh
Dukungan organisasi pendidikan seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Organisasi Swasta maupun Non-Government Organization lain sebagai pendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas	Hubungan harmonis dan selaras antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum tercipta dengan optimal dan maksimal
Peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan	Terlalu banyaknya aturan perundang-undangan tentang pendidikan dengan amanat yang harus dijalankan, kadang mengalami kendala dalam pelaksanaan karena kurangnya SDM dan pemahaman peraturan
Sumber daya manusia yang memadai	Kurangnya komitmen dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Beban pekerjaan yang terlalu banyak sehingga kadang dalam bekerja tidak menyeluruh dan komprehensif. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terbebani dengan pekerjaan administrasi sehingga kurang dalam proses belajar mengajar
Nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai dasar membentuk dan mewujudkan karakter dan budi pekerti luhur masyarakat	Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, peran mendidik orang tua di dalam keluarga kurang sehingga anak kurang paham akan nilai-nilai dan norma etika dalam bermasyarakat dan bertingkah laku Menipisnya apresiasi masyarakat terhadap budaya, sejarah dan nilai-nilai budi pekerti
Kekayaan SDA yang dapat mendukung peningkatan kualitas dan mutu pendidikan melalui pendekatan eco-education atau pendidikan berdasar kekayaan hayati daerah	Kurangnya eksplorasi kekayaan hayati dalam peningkatan kualitas dan mutu pendidikan, pengelolaan dan penyesuaian kekayaan daerah dengan muatan pendidikan di sekolah Ancaman bencana alam yang mampu menghambat dan menghentikan aktifitas kegiatan belajar mengajar
Penciptaan lingkungan serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan kualitas pemuda	Masih terbatasnya pemuda dalam membekali diri dengan ketrampilan atau keahlian yang dibutuhkan dalam kehidupan Tingginya tingkat pendidikan pemuda dengan lapangan pekerjaan yang tidak banyak sehingga banyak pemuda dengan pendidikan tinggi namun tidak memiliki pekerjaan Adanya pemikiran bahwa bekerja di perusahaan lebih baik dibandingkan menjadi wirausahawan atau membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan Kurangnya kesiapan masyarakat dalam mengantisipasi persaingan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional

Penciptaan lingkungan serta sarana dan prasana publik untuk memperluas budaya dan prestasi olahraga	Belum optimalnya pemasyarakatan dan prestasi olahraga Penggemar olahraga yang masih bersikap destruktif dan kurangnya pemahaman akan sifat sportifitas itu sendiri
Pengembangan dan pemanfaatan dari media pembelajaran berbentuk aplikasi, contain website, video, interactive interaction melalui media perantara bukan pembelajaran tatap muka	Kemampuan ekonomi keluarga siswa yang belum semua mampu mendukung berupa penyediaan peralatan elektronik seperti handphone, laptop, tablets maupun gadget lainnya. Kapasitas dan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan, terlebih yang senior dalam penggunaan peralatan elektronik maupun media pembelajaran lain sebagai ganti pembelajaran tatap muka. Penyediaan sistem jaringan berupa menara, bandwidth maupun fiber optic untuk meningkatkan akses dan jangkauan dalam peningkatan pembelajaran jarak jauh.

Analisa SWOT

Peluang/opportunity	Strategi (S-O)	Strategi (W-O)
Hubungan yang baik antar Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota	SDM yang berkualitas sehingga mampu untuk membentuk hubungan dan jaringan kerja serta koordinas yang lebih dinamis dan efisien	Meningkatkan hubungan kerjasama dan koordinasi antar lembaga dengan mengirimkan SDM yang masih berusia muda
Dukungan organisasi pendidikan seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Organisasi Swasta maupun Non Government Organization lain sebagai pendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas	SDM yang berkualitas dan berpendidikan tinggi sehingga mampu menjalin dan menjaga hubungan antar lembaga negara dan swasta dengan lebih efektif, efisien dan dinamis	Meningkatkan hubungan kerjasama dan koordinasi antar lembaga baik negeri dan swasta dengan mengirimkan SDM yang masih berusia muda
Peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan	SDM yang berkualitas dengan latar belakang pendidikan tinggi sehingga pemahaman akan peraturan perundangan yang berlaku akan dapat dilakukan secara mendalam	SDM yang memahami dan mengerti peraturan perundangan tidak hanya terhadap pejabat eselon namun juga SDM staf yang muda
Sumber daya manusia yang memadai	Peningkatan kualitas dan kapasitas sekaligus kompetensi SDM Dinas Dikpora supaya lebih tangguh dan mampu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban	Pengurangan jumlah SDM per tahun dikarenakan pensiun maka peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM yang masih ada harus diupayakan dan dilaksanakan sebagai daya dukung pelaksanaan
Nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai dasar membentuk dan mewujudkan karakter dan budi pekerti luhur masyarakat	Klungkung memiliki banyak SDM yang berkualitas dalam hal budaya sehingga dapat dimanfaatkan sebagai mentor maupun narasumber akan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan local sehingga hal tersebut dapat diajarkan kepada generasi muda selanjutnya	SDM yang memahami dan mengerti nilai-nilai luhur budaya dan kearifan local semakin sedikit sehingga dibutuhkan perubahan sikap agar tidak ada keterputusan budaya dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya

Kekayaan sumber daya alam yang dapat mendukung peningkatan kualitas dan mutu pendidikan melalui pendekatan eco-education atau pendidikan berdasar kekayaan hayati daerah	Pemanfaatan kekayaan dan ragam hayati daerah dalam pengembangan bidang pendidikan sehingga mampu mendorong pendidikan semakin mendunia di bidang riset dan teknologi dengan kekhususan akan kekayaan alam kedaerahan	Kurangnya minat sekolah dan siswa serta tidak adanya dorongan kuat dari guru untuk pemanfaatan kekayaan alam sebagai bahan riset dan kemajuan teknologi dengan pemanfaatan kekayaan ragam hayati
Penciptaan lingkungan serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan kualitas pemuda	Dukungan sarana prasarana dan SDM sebagai daya dorong untuk menumbuhkan kualitas pemuda melalui kemandirian dan kewirausahaan dengan meningkatkan peran serta pendidikan untuk memotivasi pengembangan potensi diri	Perubahan “mind set” generasi muda bahwa melalui pendidikan maka akan terbuka kesempatan yang lebih luas baik untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkan maupun memiliki usaha sendiri secara mandiri
Penciptaan lingkungan serta sarana dan prasana publik untuk memperluas budaya dan prestasi olahraga	Pemanfaatan nilai lebih fasilitas olahraga yang dimiliki tidak hanya untuk pelaksanaan olahraga yang berprestasi namun juga pemanfaatan oleh publik	Olahraga bukan lagi sekedar hobi namun olahraga adalah salah satu cara untuk mencapai prestasi dan dapat dinikmati secara bersamasama, olahraga adalah kebutuhan dan perubahan pola pikir harus dapat dilakukan karena masyarakat yang sehat adalah dasar pembangunan
Pengembangan dan pemanfaatan dari media pembelajaran berbentuk aplikasi, contain website, video, interactive interaction melalui media perantara bukan pembelajaran tatap muka	Pemanfaatan nilai lebih fasilitas sekolah yang dimiliki untuk peningkatan kualitas pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran bukan tatap muka.	Media elektronik (gadget) bukan lagi alat hiburan yang memudahkan komunikasi melainkan dapat dimaksimalkan untuk pembelajaran jarak jauh sehingga sekolah tidak lagi harus berada di sekolah namun bisa dilakukan dimana saja.
Threat/Ancaman	Strategi (S-T)	Strategi (W-T)
Hubungan yang terjalin terkadang masih parsial dan sektoral dikarenakan adanya perbedaan kewenangan antara kewenangan Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota sehingga koordinasi tidak terjadi secara menyeluruh	Penguatan hubungan kerja dan koordinasi antar tingkat pemerintah untuk mengurangi perbedaan dalam melayani dan menjawab persoalan yang ada dalam masyarakat	Pengiriman SDM yang masih memiliki masa kerja yang lama sehingga mampu untuk menjalin dan membentuk jaringan kerja yang bagus dengan melibatkan semua level pemerintahan
Hubungan harmonis dan selaras antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum tercipta dengan optimal dan maksimal	Penguatan hubungan kerja dan koordinasi untuk mengurangi perbedaan dan menyelaraskan tujuan antara program pemerintah dengan lembaga swasta/masyarakat	Pembentukan jaringan kerja antar lembaga pemerintah dan swasta/masyarakat melalui SDM yang muda dan berpotensi
Peraturan perundang-undangan tentang pendidikan yang beragam dengan amanat yang harus dijalankan, kadang mengalami kendala dalam pelaksanaan karena kurangnya SDM dan pemahaman akan suatu aturan itu sendiri	Penguatan kapasitas dan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan	Pendampingan dan bimbingan yang dilakukan oleh Senior kepada Junior dalam hal memahami pekerjaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terjadi perpindahan ilmu dan pengetahuan

Kurangnya komitmen dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan	SDM yang semakin sedikit dengan tugas dan fungsi pokok yang jelas sebagai kinerja sehingga prestasi SDM dapat dilaporkan dan dilihat dengan jelas, prestasi kinerja berdasarkan individu sehingga diharapkan dapat menambah komitmen dan tanggung jawab dalam bekerja	Membagi beban kerja yang bertambah berbanding dengan jumlah SDM yang terus berkurang dengan melihat tugas, fungsi pokok dan kemampuan individu
Beban pekerjaan yang terlalu banyak sehingga kadang dalam bekerja tidak menyeluruh dan komprehensif.	SDM yang semakin sedikit namun berkualitas sehingga dapat menjadi pendorong untuk bekerja secara efisien, efektif dan menyeluruh	Penurunan jumlah SDM akibat pensiun tanpa ada penambahan PNS maka beban kerja semakin banyak, pengangkatan tenaga honorer dengan latar belakang pendidikan tinggi sebagai jawaban untuk pembagian beban kerja
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terbebani dengan pekerjaan administrasi sehingga kurang dalam proses belajar mengajar	Pengangkatan tenaga honorer untuk menangani pekerjaan administrasi di sekolah dengan latar belakang pendidikan yang tinggi dengan harapan guru dapat berkonsentrasi untuk mengajar saja	Pengelolaan pengadaan tenaga honorer disekolah hanya berdasar tunjukan/relasi, maka kualitas dan kapasitas tenaga honorer di sekolah masih beragam
Menipisnya apresiasi masyarakat terhadap budaya, sejarah dan nilai-nilai budi pekerti	Pengamat dan pencinta serta pelestari nilai-nilai budaya dan sejarah yang mumpuni dapat dijadikan guru/mentor/narasumber dalam pengembangan dan pemahaman budaya dan sejarah di masyarakat	Perpindahakan pengetahuan dari generasi sebelumnya ke generasi muda harus dilakukan dan musti dilakukan serta dapat dilakukan karena tidak sedikit generasi muda saat ini yang memiliki minat dan keinginan untuk belajar dan melestarikan nilai-nilai budaya dan sejarah
Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, peran mendidik orang tua di dalam keluarga kurang sehingga anak kurang paham akan nilai-nilai dan norma etika dalam bermasyarakat dan bertingkah laku	Penanaman nilai-nilai etika dan budaya luhur disekolah yang musti diikuti dengan pengawasan dan pembinaan dari orang tua, dimana orang tua menjalani kembali perannya sebagai orang tua bukan teman bagi anak-anaknya	Perbedaan dan pemilahan tanggung jawab siswa saat di rumah dan sekolah yang harus dibedakan namun tidak dipisahkan, anak bebas menjadi diri mereka namun tetap dalam pengawasan orang tua
Kurangnya eksplorasi kekayaan hayati dalam peningkatan kualitas dan mutu pendidikan, pengelolaan dan penyelarasan kekayaan daerah dengan muatan pendidikan di sekolah	Sumber daya alam yang melimpah namun kurangnya SDM yang memahami dan mempelajari serta menggunakan dan memanfaatkan untuk melakukan inovasi dalam KBM sekolah	SDM masih bersifat text book sehingga kurang mengeksplorasi kemampuan pribadi untuk meneliti dan berpikir dengan berdasar pada lingkungan sekitar
Ancaman bencana alam yang cukup banyak sehingga mampu menghambat dan menghentikan aktifitas kegiatan belajar mengajar	Management bencana yang sudah terprogram disekolah untuk tahapan dan cara perlindungan diri disaat terjadi bencana	Kebiasaan masyarakat akan lupa dan mengacuhkan potensi ancaman bencana apabila tidak dilakukan pelatihan atau penanaman kebiasaan terus menerus
Masih terbatasnya pemuda dalam membekali diri dengan ketrampilan atau keahlian yang dibutuhkan dalam kehidupan	PTK yang berkualitas dan bermutu namun dalam KBM masih belum memiliki banyak inovasi sehingga masih bersifat text book	Pembelajaran di sekolah yang bersifat text book sehingga menghasilkan lulusan dengan nilai akademik yang tinggi namun kurang pengalaman

		akan kondisi riil dalam masyarakat
Tingginya tingkat pendidikan pemuda dengan lapangan pekerjaan yang tidak banyak sehingga banyak pemuda dengan pendidikan tinggi namun tidak memiliki pekerjaan	Jumlah lulusan sekolah baik tingkat SMK, akademi maupun universitas dengan nilai akademik yang baik namun kurang memiliki nilai tambah sebagai kelebihan yang patut diperhitungkan dalam melamar pekerjaan	Perubahan pola pikir bahwa sekolah tidak lagi hanya sekedar mengenyam pendidikan namun harus berupa perencanaan akan apa yang akan dicapai dan diinginkan dikemudian hari sehingga tidak terjadi kesia-siaan investasi waktu dan biaya dari orang tua dan siswa itu sendiri
Adanya pemikiran bahwa bekerja di perusahaan lebih baik dibandingkan menjadi wirausahawan atau membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan	Industri kerja yang dapat memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja yang berkualitas dapat terpenuhi karena lulusan perguruan tinggi semakin bermutu	Penyiapan kondisi bagi lulusan sekolah sebagai wirausaha dan membuka peluang usaha dengan dasar ilmu yang dimiliki melalui peningkatan motivasi
Kurangnya kesiapan masyarakat dalam mengantisipasi persaingan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional	Universitas/ lembaga pendidikan tinggi di Bali dalam jumlah banyak sehingga lebih dapat menyiapkan generasi muda dalam menghadapi dan bersiap diri akan persaingan di tingkat nasional maupun global	Perubahan mind set bahwa sekolah tidak hanya sekedar sekolah namun harus diikuti dengan mengikuti kemajuan dan kebutuhan akan pembangunan dan perkembangan, sehingga tidak tercipta generasi muda dengan tingkat pendidikan tinggi namun tidak bisa menemukan pekerjaan yang sesuai
Belum optimalnya pemasyarakatan dan prestasi olahraga	Kesehatan dan pembangunan yang harus berjalan sejajar, penyehatan masyarakat melalui pemasyarakatan olahraga dan prestasi	Kesadaran akan kesehatan jasmani dan mental masyarakat melalui olahraga yang mulai terbangun namun masih terkendala kemampuan untuk mengatur diri dan waktu untuk melakukan olahraga
Penggemar olahraga yang masih bersikap destruktif dan kurangnya pemahaman akan sifat sportifitas itu sendiri	Sarana prasarana olahraga yang sudah cukup baik dan mampu dimanfaatkan untuk standar penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat nasional dan internasional	Kurang adanya sikap kesadaran diri bahwa sarana prasarana tersebut berasal dari uang rakyat melalui pajak, dimana masih ada masyarakat yang merusak sarana dan prasarana olahraga, serta kurangnya kematangan dalam berpikir bahwa dalam olahraga menang dan kalah itu adalah biasa bukan alasan untuk bersikap anarkis
Kemampuan ekonomi keluarga siswa yang belum semua mampu mendukung berupa penyediaan peralatan elektronik seperti handphone, laptop, tablets maupun gadget lainnya.	Sarana prasarana sekolah berupa computer, laptop maupun tablet bisa dimanfaatkan/ dipinjamkan kepada siswa dari keluarga tidak mampu	Adanya kekhawatiran apabila peralatan dipinjamkan sekolah akan timbul anggapan bahwa alat tersebut diberikan dan bisa dijual/digadaikan oleh orang tua/anggota keluarga siswa

<p>Kapasitas dan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan, terlebih yang senior dalam penggunaan peralatan elektronik maupun media pembelajaran lain sebagai ganti pembelajaran tatap muka.</p>	<p>Kemampuan dan ketrampilan guru yang sudah diatas 50 th yang tidak begitu fasih dan trampil dalam penggunaan dan pemanfaatan gadget maupun media pembelajaran lain sebagai bentuk baru dari proses belajar mengajar.</p>	<p>Kesadaran akan kemampuan dan ketrampilan yang kurang dalam memanfaatkan gadget dan media pembelajaran namun tidak diimbangi dengan kesadaran untuk mencari dan memperoleh kemampuan dan ketrampilan baru terkait penggunaan gadget dan media pembelajaran sebagai bentuk proses belajar mengajar jarak jauh.</p>
<p>Penyediaan sistem jaringan berupa menara, bandwith maupun fiber optic untuk meningkatkan akses dan jangkauan dalam peningkatan pembelajaran jarak jauh.</p>	<p>Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemda yang sudah tersedia dapat digunakan, dengan kemungkinan akan semakin bertambah untuk mendukung pembelajaran jarak jauh baik selama pandemic covid maupun setelah sebagai bentuk proses belajar mengajar mandiri dan baru.</p>	<p>Pemanfaatan secara maksimal dan pembangunan sarana prasarana baru sebagai pendukung bentuk proses pembelajaran mandiri, maju, inovatif dan kreatif dengan menggunakan berbagai media pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran jarak jauh</p>

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung yang dilihat dari keadaan masyarakat baik dari keadaan sosial maupun ekonomi masyarakat, diiringi dengan perkembangan dalam era globalisasi yang menuntut peningkatan indeks perkembangan manusia dan kualitas sumber daya manusia dan sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Klungkung, maka dapat dirangkum beberapa permasalahan sampai dengan tahun 2021 khususnya dalam bidang pendidikan kepemudaan dan olahraga di wilayah kabupaten Klungkung dalam mewujudkan hal-hal diatas antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan	Masalah	Akar Masalah
Angka Partisipasi pada jenjang pendidikan PAUD yang masih rendah, hal ini yang ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) usia 3-6 tahun hanya mencapai 50.34% dan Angka Partisipasi Murni (APM) hanya mencapai 49,2%. Hal ini menyebabkan Angka Kesiapan Sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi hanya mencapai 55%.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Pembelajaran tidak yang Sesuai untuk Anak Usia Dini 2. Indeks Ketersediaan Sarana Prasarana Esensial yang masih kurang 3. Indeks Kemitraan dengan Orang Tua/Wali untuk Kesiambungan Stimulasi di Satuan dan di Rumah yang masih kurang 4. Indeks Layanan Holistik Integratif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 yang masih rendah 2. Proporsi Kepala Satuan Berijazah Minimal S1/D4 belum memadai 3. Proporsi PTK Bersertifikat dari PPG yang masih rendah 4. Proporsi PTK dalam Diklat Teknis yang masih kurang
Pertumbuhan proporsi jumlah satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi B masih rendah dengan capaian 68,89%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan untuk Proses Pembelajaran yang Efektif masih perlu ditingkatkan 2. Asesmen yang Meningkatkan Kualitas Pembelajaran tidak dilakukan secara berkesinambungan 3. Indeks Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Pendidik yang belum dilaksanakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Pendidik yang masih dibawah ketentuan 2. Proporsi GTK Penggerak yang masih sedikit 3. Indeks Distribusi Guru yang belum merata 4. Ketersediaan Jumlah Pengawas yang masih rendah

Permasalahan	Masalah	Akar Masalah
	<p>4. Indeks Kepemimpinan dan Kebijakan Satuan yang Mendukung Refleksi dan Perbaikan Layanan masih kurang</p> <p>5. Indeks Kapasitas Perencanaan yang perlu ditingkatkan</p>	
<p>Indeks kualitas hasil belajar jenjang SD yang masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan indeks kemampuan literasi 1,8 dan indeks kemampuan numerasi 1,63 dengan nilai maksimum 3,00</p> <p>Indeks kualitas hasil belajar jenjang SMP yang masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan indeks kemampuan literasi 1,86 dan indeks kemampuan numerasi 1,67 dengan nilai maksimum 3,00</p>	<p>1. Indeks Kualitas pembelajaran yang perlu ditingkatkan</p> <p>2. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru telah dilaksanakan dan perlu ditingkatkan</p> <p>3. Kepemimpinan instruksional yang telah terlaksana namun perlu ditingkatkan</p> <p>4. Iklim keamanan, kesetaraan gender, kebhinekaan dan inklusivitas yang telah terjaga dengan baik</p> <p>5. Kesenjangan bahan dan fasilitas belajar yang masih tinggi</p> <p>6. Kesenjangan akses dan fasilitas belajar daring yang masih tinggi</p>	<p>1. Proporsi GTK bersertifikat PPG yang masih rendah</p> <p>2. Proporsi GTK penggerak juga masih rendah</p> <p>3. Pengalaman pelatihan GTK yang perlu ditingkatkan</p> <p>4. Rata-rata nilai uji kompetensi guru yang rendah</p> <p>5. Kehadiran guru di kelas perlu ditingkatkan</p> <p>6. Indeks Distribusi Guru yang perlu ditingkatkan</p> <p>7. Pemenuhan kebutuhan Guru yang masih rendah</p> <p>8. Partisipasi warga sekolah yang rendah</p> <p>9. Proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu masih rendah</p> <p>10. Pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran sekolah perlu ditingkatkan</p> <p>11. Proporsi pemanfaatan APBD untuk pendidikan sudah memadai</p>

Permasalahan	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya upaya pelaksanaan pembinaan atlet daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pelatih yang memiliki lisensi kepelatihan masih cukup rendah. Dari 41 cabang olahraga yang terdaftar pada KONI Klungkung hanya 24 cabang olahraga yang telah memiliki pelatih berlisensi dengan jumlah pelatih berlisensi sebanyak 26 orang. 2. Sarana dan Prasarana olahraga yang belum memadai, jumlah cabang olahraga yang telah memiliki sarana prasarana sesuai dengan peruntukan olahraganya sebanyak 14 cabang olahraga dan belum semuanya sesuai dengan standar. Sebagian besar dimiliki oleh kelompok masyarakat. 3. Pelaksanaan kompetisi olahraga yang masih belum bisa berlangsung secara optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibutuhkan dana yang cukup besar untuk memperoleh lisensi pelatih. Pemerintah Kabupaten harus bekerjasama dengan KONI Klungkung untuk mengadakan pelatihan/uji kompetensi bagi pelatih olahraga di sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan jumlah pelatih bersertifikasi. 2. Dana untuk pembangunan sarana yang cukup tinggi. Pemerintah serta KONI bekerjasama dengan kelompok masyarakat berusaha untuk mengembangkan prasarana yang ada baik dari segi pemeliharaan maupun pengadaannya. 3. Kompetisi yang belum bisa berjalan dengan baik digantikan dengan pembinaan atlet terpadu yang dilaksanakan oleh KONI Kabupaten Klungkung

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Klungkung merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program pembangunan Kabupaten Klungkung secara keseluruhan. Arah program pembangunan Kabupaten Klungkung tercermin dari Visi dan Misi pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam Program Pembangunan Daerah (Propeda) telah ditetapkan program prioritas. Untuk itu, dalam menetapkan program pembangunan pendidikan oleh Dinas Pendidikan tidak dapat lepas dari visi dan misi kabupaten.

Visi Kabupaten Klungkung

“Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera”.

Misi Kabupaten Klungkung

1. Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat budaya Bali.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan.
4. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik.
5. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Berpedoman kepada misi Kabupaten Klungkung tersebut, maka Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebagai salah satu OPD di wilayah Kabupaten Klungkung memiliki tugas dan fungsi dalam mewujudkan misi kedua Kabupaten Klungkung yaitu dalam “Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dan dukungan dari berbagai pihak mengingat beberapa permasalahan seperti yang tertera pada tabel sebelumnya ditambah lagi dengan permasalahan faktor ekonomi masyarakat yang masih tergolong cukup rendah terutama pada daerah pedesaan yang mengakibatkan banyak penduduk Kabupaten Klungkung yang terdahulu mengalami putus sekolah dan bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali.

Untuk menanggulangi permasalahan permasalahan tersebut dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada maka Dinas Pendidikan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan tiga strategi, yaitu: 1) Peningkatan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat, 2) Peningkatan kualitas SDM masyarakat yang berdaya saing di bursa kerja dan 3) Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan usia dini, dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau.

Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi

Visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi

“Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman,

bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.”

Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra;
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Tahun:

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter;
3. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan;
4. Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi; dan
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan kementerian seperti tersebut di atas, maka Dinas Pendidikan di Kabupaten Klungkung diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan utamanya pendidikan anak usia dini, meningkatkan mutu hasil pembelajaran siswa.

Telahan Renstra Provinsi Bali

Visi Provinsi Bali

"NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI"

Misi Provinsi Bali

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali;
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani;
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan;
4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun;
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas, bermutu, profesional, dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal krama Bali;
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh, dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya;
8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri;
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri;
10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali;
11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara skala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih, yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih;
12. Memperkuat kedudukan tugas dan fungsi Desa Pakraman/Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan;

13. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten/kota se-Bali;
14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar kabupaten/kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas baru;
15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif;
16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten/kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas;
17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali;
18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut, dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali;
19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan;
20. Mewujudkan kehidupan krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik, dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali;
21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah, dan bersih;
22. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.

a. Program Prioritas Provinsi Bali

Mencakup 5 Bidang

- 1) Bidang 1 : Pangan, Sandang dan Papan
- 2) Bidang 2: Kesehatan dan Pendidikan
- 3) Bidang 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
- 4) Bidang 4 : Adat , Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

5) Bidang 5 : Pariwisata

Berdasarkan Visi dan Misi Provinsi Bali Maka Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung untuk menciptakan dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas, dan berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan hindu sehingga pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dapat tercapai dengan baik. Dan tentu hal itu merupakan suatu tugas yang berat mengingat samapai dengan tahun 2020 masih terdapat beberapa permasalahan ataupun kendala yang di hadapi dalam bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Klungkung seperti:

- 1 Masih minimnya layanan pendidikan Anak Usia Dini yang berstatus TK Negeri
- 2 Masih kurangnya sarana prasarana pendukung pembelajaran yang dimiliki oleh beberapa sekolah di wilayah Kabupaten Klungkung, dan
- 3 Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan di wilayah Kabupaten Klungkung.

Beberapa hal tersebut harus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, sehingga nantinya keterjangkauan dan kualitas pendidikan di wilayah Kabupaten Klungkung dapat lebih ditingkatkan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Memperhatikan peta wilayah Kabupaten Klungkung yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan serta penyebaran penduduk yang tidak merata yang cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan dan daerah pariwisata, maka yang menjadi fokus perhatian adalah pemerataan dan perluasan kesempatan serta kesenjangan mutu. Adapun beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan pendidikan adalah melakukan efisiensi dengan melakukan *regrouping* untuk sekolah-sekolah yang jumlah siswanya sangat kecil, meningkatkan daya tampung pada daerah yang padat penduduk, penyesuaian kompetensi lulusan, penyesuaian program muatan lokal, perbaikan mutu pendidikan di daerah pedesaan, pemerataan pembangunan sarana prasarana pendidikan.

Sebagai daerah yang mengandalkan potensi daerah pada bidang pertanian, perikanan/kelautan serta pariwisata semestinya Klungkung harus dapat

mengantisipasi segala keperluan dunia pertanian, perikanan/kelautan dan pariwisata. Maka, program pengembangan pendidikan di bidang akademik (Mata Pelajaran dan Muatan Lokal), pengembangan diri dan pendidikan kecakapan hidup serta pembinaan ketenagaan di bidang pendidikan diarahkan pula untuk pemenuhan kebutuhan pertanian, perikanan/kelautan. Berikut disajikan tabel kajian lingkungan hidup strategis yang berpengaruh terhadap pendidikan:

Tabel 3.11

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

NO	JENIS DATA	SPESIFIKASI DATA
1	Pendidikan Berkualitas	Proporsi murid SD kelas 4 yang mencapai standar k minimum dalam membaca Proporsi murid SD kelas 4 yang mencapai standar k minimum dalam matematika Proporsi murid SD kelas 6 yang mencapai standar k minimum dalam membaca Proporsi murid SD kelas 6 yang mencapai standar k minimum dalam matematika Proporsi murid SMP kelas 9 yang mencapai standar minimum dalam membaca Proporsi murid SMP kelas 9 yang mencapai standar minimum dalam matematika Persentase SD berakreditasi minimal B Persentase SMP berakreditasi minimal B Persentase SMA berakreditasi minimal B
2	Fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua	Proporsi SD memiliki listrik Proporsi SD memiliki internet untuk tujuan pengaja Proporsi SD memiliki komputer untuk tujuan penga Proporsi SD memiliki Infrastruktur dan materi mem disabilitas Proporsi SD memiliki air minum layak Proporsi SD memiliki toilet terpisah untuk laki-laki Proporsi SD memiliki fasilitas cuci tangan Proporsi SMP memiliki internet untuk tujuan penga Proporsi SMP memiliki komputer untuk tujuan pen Proporsi SMP memiliki Infrastruktur dan materi me siswa disabilitas Proporsi SMP memiliki air minum layak Proporsi SMP memiliki toilet terpisah untuk laki-lak perempuan Proporsi SMP memiliki fasilitas cuci tangan Proporsi SMA/SMK memiliki internet untuk tujuan Proporsi SMA/SMK memiliki komputer untuk tuju Proporsi SMA/SMK memiliki Infrastruktur dan mate bagi siswa disabilitas

		Proporsi SMA/SMK memiliki air minum layak
		Proporsi SMA/SMK memiliki toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan
		Proporsi SMA/SMK memiliki fasilitas cuci tangan
3	Kualitas pendidikan	Persentase guru TK bersertifikat pendidik
		Persentase guru SD bersertifikat pendidik
		Persentase guru SMP bersertifikat pendidik
		Persentase guru SMA/SMK bersertifikat pendidik
4	Pengendalian pencemaran	Jumlah sekolah SD, SMP, SMA/SMK menerapkan Ayo Belajar di Wilayah Mandala
5	Standar Pelayanan Masyarakat	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister

Kondisi kesehatan masyarakat, persepsi masyarakat terhadap pendidikan dan pengaruh dunia pariwisata pada berbagai sektor kehidupan masyarakat Kabupaten Klungkung, tidak dapat diabaikan dari pembangunan pendidikan. Dengan memperhatikan kondisi ini, maka perhatian pembangunan pendidikan Kabupaten Klungkung adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan ekonomi yang sangat labil, seperti: menekan biaya pendidikan, meningkatkan derajat kesehatan peserta didik dan melakukan penguatan kinerja Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan analisis SWOT, sasaran strategis pendidikan dan kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2018-2023 seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang selanjutnya dijadikan dasar penentuan program-program sebagai berikut:

Isu-Isu Strategis:

1. Wajib Belajar Pendidikan Pra Sekoah

Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) mengatur wajib belajar dimulai dari kelas prasekolah atau usia lima/enam tahun. Rinciannya, wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar bagi warga negara yang berusia lima/enam tahun sampai dengan 15 tahun. Sementara wajib belajar pada jenjang pendidikan menengah bagi warga negara berusia 16-18 tahun. Adapun kelas prasekolah dikatakan bertujuan untuk membantu anak menyesuaikan diri dan menjalani transisi dengan lancar menuju proses belajar yang lebih terstruktur pada kelas satu sampai dengan kelas sembilan. RUU Sisdiknas ini akan menjadi tantangan tersendiri di

Kabupaten Klungkung mengingat capaian angka partisipasi pendidikan pra sekolah PAUD usia 5-6 tahun yang hanya mencapai 76,16% .

2. Digitalisasi Pembelajaran

Perubahan pola belajar sebagai akibat dari pandemi covid-19 akan tetap berlanjut ke masa yang akan datang, hal ini disebabkan karena pola pembelajaran secara daring dengan memanfaatkan teknologi lebih efektif dan efisien. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat pada saat pandemi guru dan siswa dipaksa untuk menerapkan proses belajar secara daring. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah mengeluarkan platform merdeka mengajar tapi hanya sedikit guru yang menerapkan platform tersebut.

3. Pembangunan olahraga merupakan salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh yang dapat mendukung produktivitas sumber daya manusia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengamanatkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Isu Strategis Keolahragaan adalah sebagai berikut: a. Optimalisasi pengembangan olahraga pendidikan, rekreasi dan disabilitas. b. Optimalisasi pembinaan olahraga prestasi pelajar dan mahasiswa serta sama keolahragaan. c. Perbaikan manajemen pembinaan olahraga. d. Mewujudkan masyarakat Jakarta yang bugar dengan gemar berolahraga dan merupakan bagian hidup masyarakat.

4. Penciptaan lingkungan serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan kualitas pemuda. Dukungan sarana prasarana dan SDM sebagai daya dorong untuk menumbuhkan kualitas pemuda melalui kemandirian dan kewirausahaan dengan meningkatkan peran serta pendidikan untuk memotivasi pengembangan potensi diri. Perubahan pola pikir generasi muda bahwa melalui pendidikan maka akan terbuka kesempatan yang lebih luas baik untuk memperoleh pekerjaan yang

diinginkan menjadi dengan pendidikan generasi muda mampu membuka peluang usaha sendiri secara mandiri.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pembangunan bidang pendidikan serta bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Klungkung merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program pembangunan Kabupaten Klungkung secara keseluruhan. Arah program pembangunan Kabupaten Klungkung tercermin dari Visi dan Misi pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk itu, dalam menetapkan program pembangunan pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung tidak dapat lepas dari visi dan misi kabupaten. Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung merumuskan tujuan, sasaran dan indikator dari masing-masing sasaran yang disertai target kinerja dari tahun 2018 sampai dengan 2023 seperti yang terlihat pada tabel berikut:

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung

a. Tujuan:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Klungkung
2. Meningkatkan Kapasitas Pemuda dan Atlet Kabupaten Klungkung

b. Sasaran:

1. Meningkatnya Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan di Kabupaten Klungkung
2. Meningkatnya Jumlah Pemuda dan Atlet yang Berprestasi Di Tingkat Provinsi dan Nasional.

Penetapan tujuan didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan, sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung Tahun 2019-2023 seperti tabel dibawah ini:

Tujuan dan Indikator Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Renstra Perangkat Daerah tahun Ke				
			1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kabupaten Klungkung	Rata-rata lama sekolah	8.12	8.13	8.14	8.15	8.16
		Angka Harapan Lama Sekolah	12.98	12.99	13.00	13.01	13.02
2	Meningkatkan Kapasitas Pemuda dan Atlet Kabupaten Klungkung	Jumlah Pemuda dan Atlet Kabupaten Yang Berprestasi Tingkat Provinsi Dan Nasional	230	147	158	172	283

Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah tahun Ke				
				1	2	3	4	5
A	Meningkatnya Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan di Kabupaten Klungkung							
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)(%)	100,00	100,00	73,50	74,00	76,16	100,00	100,00
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B (%)	71,01	71,01	62,31	64,49	66,67	68,84	71,01
4	Proporsi PTK Bersertifikat dari PPG (%)	61,00	61,00	57,00	58,00	59,21	60,00	61,00
5	Rasio pengawas/penilik PAUD (%)	50%	50%	43%	43%	43%	43%	50%
6	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (nilai)	1,82	1,82	1,78	1,79	1,80	1,81	1,82
7	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional (nilai)	1,88	1,88	1,84	1,85	1,86	1,87	1,88

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah tahun Ke				
				1	2	3	4	5
8	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (nilai)	1,65	1,65	1,61	1,62	1,63	1,64	1,65
9	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional (nilai)	1,69	1,69	1,65	1,66	1,67	1,68	1,69
B	Meningkatnya Jumlah Pemuda dan Atlet yang Berprestasi Di Tingkat Provinsi dan Nasional							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	6,69%	6,69%	N/A	N/A	N/A	6,69%	6,69%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	0,05%	0,05%	N/A	N/A	N/A	0,05%	0,05%
3	Peningkatan prestasi olahraga (medali emas)	12	12	0	1	13	12	12
C	Terwujudnya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi							
1	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (niai)	28,00	28,00	25,89	25,89	26,96	27,50	28,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Umum

Strategi dan Kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung, serta mengacu pada Renstra SKPD Dinas Pendidikan tahun 2018-2023, evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai tahun 2020. Kebijakan pembangunan pendidikan ini juga memperhatikan komitmen pemerintah Kabupaten Klungkung yang mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Untuk lebih jelasnya tentang hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa		
Sasaran 1 : Meningkatnya Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan di Kabupaten Klungkung	Meningkatkan pemerataan layanan PAUD	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun 2 Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun 3 Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik PAUD dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 4 Penyediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa 5 Penyediaan layanan PAUD di wilayah yang kekurangan daya tampung 6 Penyediaan layanan PAUD di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal
	Mendorong tumbuhnya satuan PAUD berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 2 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan PAUD yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran 3 Fasilitasi pertemuan guru/pendidik PAUD dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 4 Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan PAUD secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 5 Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan PAUD yang rusak 6 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan PAUD

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>8 Pengajuan formasi guru ASN PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>9 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD</p> <p>10 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah PAUD</p> <p>11 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan PAUD yang menyelenggarakan pendidikan inklusif</p>
	Meningkatkan jumlah pengawas PAUD sesuai kebutuhan	1 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah PAUD
	Meningkatkan jumlah PTK PAUD yang berkualitas dan sesuai kompetensi	<p>1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan</p> <p>2 Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD</p> <p>3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru PAUD yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak</p>
	Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan SD dan SMP yang berkualitas kepada anak usia 7-15 tahun	<p>1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SD</p> <p>2 Pendataan warga negara usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SMP</p> <p>3 Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik SD dan SMP dari keluarga tidak mampu sampai lulus</p> <p>4 Penyediaan layanan pendidikan SD dan SMP di wilayah yang kekurangan daya tampung</p> <p>5 Penyediaan layanan pendidikan SD dan SMP di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal</p> <p>6 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan SD dan SMP untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan</p> <p>7 Pemeriksaan kondisi bangunan SD dan SMP paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</p> <p>8 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan SD dan SMP yang rusak sedang dan rusak berat</p> <p>9 Sosialisasi kepada satuan pendidikan SD dan SMP mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran</p>
	Meningkatkan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik SD dan SMP	<p>1 Pembentukan komunitas belajar jenjang SD dan SMP dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut</p> <p>2 Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru SD dan SMP</p> <p>3 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</p> <p>4 Pengajuan formasi guru ASN SD dan SMP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah SD dan SMP</p>

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah SD dan SMP</p> <p>7 Pemerataan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan SD dan SMP</p> <p>8 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP</p> <p>9 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif pada jenjang SD dan SMP</p> <p>10 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan</p> <p>11 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP</p> <p>12 Fasilitasi kepala sekolah atau guru SD dan SMP yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak</p>
	Meningkatkan pemenuhan layanan dasar pendidikan kesetaraan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kesetaraan	<p>1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah</p> <p>2 Pembentukan komunitas belajar SPNF dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut</p> <p>3 Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru SPNF</p> <p>4 Pemeriksaan kondisi bangunan SPNF paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</p> <p>5 Perbaikan terhadap kondisi bangunan SPNF yang rusak sedang dan rusak berat</p> <p>6 Sosialisasi kepada SPNF mengenai peningkatan kualitas layanan kepada SPNF paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran</p> <p>7 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan SPNF</p> <p>8 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SPNF yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan</p>
Tujuan 2 : Meningkatkan Kapasitas Pemuda dan Atlet Kabupaten Klungkung		
Sasaran 2 : Meningkatnya Jumlah Pemuda dan Atlet yang Berprestasi Di Tingkat Provinsi dan Nasional	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	<p>1 Meningkatkan jumlah organisasi pemuda dan organisasi social kemasyarakatan</p> <p>2 Meningkatkan peran serta pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan</p> <p>3 Meningkatkan volume kegiatan kepemudaan tingkat daerah</p>
	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	<p>1 Memberikan insentif atau bantuan permodalan bagi pemuda berwirausaha mandiri</p> <p>2 Merencanakan program pemuda mandiri membangun desa bersama Yowana Gema Santi</p> <p>3 Pelatihan wira usaha mandiri bersama Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan</p>
	Peningkatan prestasi olahraga (medali emas)	<p>1 Peningkatan jumlah pelatih bersertifikasi</p> <p>2 Penyediaan pelatih yang sesuai kompetensi kepelatihan cabang olahraga</p> <p>3 Penyediaan sarana dan prasarana olahraga bekerjasama dengan pihak swasta</p> <p>4 Peningkatan jumlah kompetisi di tingkat daerah pada semua cabang olahraga</p> <p>5 Penyelenggaraan kompetisi olahraga dari tingkat sekolah untuk mencari bibit olahraga prestasi</p>

BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh SKPD maupun Pemerintah Daerah.

Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat Nasional. Musrenbang merupakan forum para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi. Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan lima tahunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Berdasarkan uraian visi dan misi, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung mengagendakan rencana program/kegiatan indikatif untuk periode 2018 – 2023 antara lain:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Klungkung Tahun 2018 s/d 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat				Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	12,94 tahun	12,98		12,99		13,00		13,01		13,02		13,02		Disdikpora		
				Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS)	7,46 tahun	8,12		8,13		8,14		8,15		8,16		8,16			8,16	
Meningkatnya Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan di Kabupaten Klungkung				Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	73%	73,50		74,00		76,16		100,00		100,00		100,00		Disdikpora (SPM)		
				Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Disdikpora (SPM)
				Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	60,14%	62,31		64,49		66,67		68,84		71,01		71,01		71,01		Disdikpora (SPM)
				Proporsi PTK Bersertifikat dari PPG	56%	57,00		58,00		59,21		60,00		61,00		61,00		61,00		Disdikpora
				Rasio pengawas/penilik PAUD	43%	43%		43%		43%		43%		50%		50%		50%		Disdikpora (SPM)
				Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,77 nilai	1,78		1,79		1,80		1,81		1,82		1,82		1,82		Disdikpora (SPM)
				Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,83 nilai	1,84		1,85		1,86		1,87		1,88		1,88		1,88		Disdikpora (SPM)
				Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,6 nilai	1,61		1,62		1,63		1,64		1,65		1,65		1,65		Disdikpora (SPM)
				Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,64 nilai	1,65		1,66		1,67		1,68		1,69		1,69		1,69		Disdikpora (SPM)
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A	27%	27,68	51.372.035.387,00	30,95	62.209.251.336,00	33,63	63.477.335.494,00	37,20	56.103.890.793,00	40,77	89.267.982.498,00	40,77	322.430.495.508,00	Disdikpora		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Jumlah PAUD Terakreditasi	62,31%	64,49	4.407.134.496,00	66,67	7.959.587,37	68,84	8.920.311,23	71,01	10.283.580,87	73,18	13.813.721,56	73,18	45.384,3	Disdikpora
				Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD S1 dan D IV	71%	71,00		72,00	8,00	73,06	1,00	74,00	8,00	75,00	8,00	75,00	35.551,00	Disdikpora (SPM)
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Jumlah Lembaga Pendidikan NonFormal Terakreditasi	33,33%	33,33	635.899.500,00	33,33	455.112.500,00	66,67	722.719.825,00	66,67	388.180.500,00	66,67	753.554.000,00	66,67	2.955,466,325,00	Disdikpora
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Jumlah SD Terakreditasi Minimal A	37,50%	39,70	22.211.997,70	41,91	28.864.014,4	44,11	35.820.951,8	46,32	27.865.822,94	48,52	45.077.245,42	48,52	159.840,	Disdikpora
				Proporsi Guru SD Berijazah Minimal S1 dan D IV	93,78%	94,54	1,00	95,31	04,50	96,08	15,00	96,84	4,00	97,61	2,00		032.286,50	Disdikpora
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Jumlah SMP Terakreditasi Minimal A	50%	54,54	24.117.003,69	54,54	24.930.537,0	59,09	18.013.352,6	59,09	17.566.306,47	63,63	29.623.461,50	63,63	114.250,	Disdikpora
				Proporsi Guru SMP Berijazah Minimal S1 dan D IV	95,80%	96,26	0,00	96,73	53,50	97,20	23,00	98,60	1,00	100,00	8,00	100,00	661.345,50	Disdikpora
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBA NGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan Telah Mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	100%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	43.328.800,00	100,00	56.280.250,00	100,00	117.776.750,00	100,00	217.385.800,00	Disdikpora
		1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase jumlah lembaga PAUD dan Pendidikan NonFormal telah menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	100%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	39.848.800,00	100,00	27.897.250,00	100,00	81.779.500,00	100,00	149.525.550,00	Disdikpora
		1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase jumlah SD dan SMP telah menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	100%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.480.000,00	100,00	28.383.000,00	100,00	35.997.250,00	100,00	67.860,250,00	Disdikpora
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pemenuhan Guru	100%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.350.700,00	100,00	2.350,700,00	Disdikpora

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan NonFormal Kesetaraan	Indeks Distribusi Guru	2 nilai	2,1		2,2		2,3		2,4		2,5	2.350.700,00	2,5	2.350.700,00	Disdikpora
Meningkatkan Kapasitas Pemuda dan Atlet Kabupaten Klungkung				Jumlah Pemuda dan Atlet Kabupaten Yang Berprestasi Tingkat Provinsi Dan Nasional	210 orang	230		147		158		172		283		283		
	Meningkatnya Jumlah Pemuda dan Atlet yang Berprestasi Di Tingkat Provinsi dan Nasional			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	N/A	N/A		N/A		N/A		6,69%		6,69%		6,69%		
				Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	N/A	N/A		N/A		N/A		0,05%		0,05%		0,05%		
				Peningkatan prestasi olahraga	0 medali emas	0		1		13		12		12		12		
		2.19.01	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAG AAN	Jumlah Atlet Kabupaten Yang Berprestasi Tingkat Provinsi Dan Nasional	130 orang	135	1.828.957.456,00	40	450.470.683,00	46	3.750.330.000,00	45	5.691.642.842,00	155	7.623.681.200,00	155	19.345.082.181,00	Disdikpora
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelatih Cabang Olahraga yang Bersertifikat	52 orang/24 cabor	52	1.614.946.219,00	52	182.978.429,00	52	3.482.837.746,00	150	5.425.267.900,00	155	6.969.495.900,00	155	17.675.526.194,00	Disdikpora
				Jumlah Cabang Olahraga yang Aktif	41 cabor	41		41		41		44		47		47		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga milik pemda terpelihara dengan baik	8 unit	8	214.011.237	8	267.492.254,00	8	267.492.254,00	8	266.374.942,00	8	654.185.300,00	8	1.669.555.987,00	Disdikpora
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDA AN	Jumlah Pemuda yang Aktif Dalam Organisasi	90 orang	95	267.492.254,00	107	431.967.790,00	112	977.106.200,00	127	1.442.734.754,00	128	1.453.899.854,00	128	4.573.200.852,00	Disdikpora
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Potensi Diri	90 orang	95	267.492.254,00	107	431.967.790,00	112	977.106.200,00	127	1.442.734.754,00	128	703.899.854,00	128	3.823.200.852,00	Disdikpora
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Aktif	2 organisasi	2		2		2		2		2	750.000.000,00		750.000.000,00	Disdikpora
Terwujudnya percepatan pelaksanaan				Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	55 point	57,85		58,62		60,4		61,90		63,40		63,40		Disdikpora

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
reformasi birokrasi																		
	Terwujudnya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	25,89 nilai	25,89		25,89		26,96		27,50		28,00		28,00		Disdikpora
		x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	25,89 nilai	25,89	232.54 3.010.8 04,00	25,89	205.83 2.667. 674,00	26,96	216.45 8.140. 220,00	27,50	237.75 8.889.3 64,00	28,00	219.15 0.510.8 62,00	28,00	1.11 1.74 3.21 8.92 4,00	Disdikpora
		x.xx.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,00 nilai	81,00	167.09 6.400,0 0	81,00	48.617 .270,0 0	81,49	57.411 .300,0 0	81,75	67.205. 250,00	82,00	79.045. 250,00	82,00	419. 375. 470, 00	Disdikpora
		x.xx.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu	4 laporan	4	227.32 6.802.8 10,00	4	203.51 4.442. 535,00	4	214.06 6.023. 456,00	4	235.10 7.194.3 58,00	4	215.42 6.975.8 56,00	20	1.09 5.44 1.43 9.01 5,00	Disdikpora
		x.xx.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	82%	82	4.356.1 94.668, 00	94,84	1.601. 957.84 3,00	97,11	1.649. 295.44 7,00	98,00	1.806.1 89.688, 00	99,00	1.806.1 89.688, 00	99,00	11.2 19.8 27.3 34,0 0	Disdikpora
		x.xx.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100%	100	692.91 6.926,0 0	100	667.65 0.026, 00	100	685.41 0.017, 00	100	778.30 0.068,0 0	100	1.838.3 00.068, 00	100	4.66 2.57 7.10 5,00	Disdikpora
Total							286.01 1.495.9 01,00	2.114	268.92 4.357. 483,00	2.212	284.70 6.240. 714,00	2.397	301.05 3.438.0 03,00	2.651	317.61 6.201.8 64,00	2.567	1.45 8.31 1.73 3.96 5,00	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, diperlukan suatu alat ukur yang disebut dengan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*) (Permendagri No 86 Tahun 2017: 9). Perkembangan Indikator Kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Indikator kerja tersebut saat ini sudah diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.

Indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (RPJM)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
I	Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kabupaten Klungkung							
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) Penduduk Klungkung	7.46 tahun	8.12	8.13	8.14	8.15	8.16	8.16
2	Angka Harapan Lama Sekolah	12.94 tahun	12.98	12.99	13.00	13.01	13.02	13.02
A	Sasaran I: Meningkatnya Akses Mutu dan Tata Kelola Pendidikan di Kabupaten Klungkung							
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)(%)	73%	73,50	74,00	76,16	100,00	100,00	100,00
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)(%)	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD	60.14%	62,31	64,49	66,67	68,84	71,01	71,01

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (RPJM)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	yang mendapatkan minimal akreditasi B (%)							
4	Proporsi PTK Bersertifikat dari PPG (%)	56%	57,00	58,00	59,21	60,00	61,00	61,00
5	Rasio pengawas/penilik PAUD (%)	43%	43	43	43	43	50	50
6	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (nilai)	1.77 nilai	1,78	1,79	1,80	1,81	1,82	1,82
7	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional (nilai)	1.83 nilai	1,84	1,85	1,86	1,87	1,88	1,88
8	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (nilai)	1.60 nilai	1,61	1,62	1,63	1,64	1,65	1,65
9	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional (nilai)	1.64 nilai	1,65	1,66	1,67	1,68	1,69	1,69
B	Sasaran II: Meningkatnya Jumlah Pemuda dan Atlet yang Berprestasi Di Tingkat Provinsi dan Nasional							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	N/A%	N/A	N/A	N/A	6,69	6,69	6,69
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	N/A%	N/A	N/A	N/A	0,05	0,05	0,05
3	Peningkatan prestasi olahraga (medali emas)	0 medali emas	0	1	13	12	12	12
C	Sasaran III: Terwujudnya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi							
1	Indeks Reformasi Birokrasi Peringkat Daerah (nilai)	28,00	28,00	25,89	25,89	26,96	27,50	28,00

Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Dinas pendidikan Kabupaten Klungkung selama 5 tahun kedepan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Data Indikator dan Target Kinerja Daerah
Permendagri 86 Tahun 2017

No.	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator/Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	Pendidikan						
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
1.2	Angka partisipasi kasar	64,65	64,90	65,00	65,50	66,00	66,50
1.3	Angka pendidikan yang ditamatkan						
1.4	Angka Partisipasi Murni						
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	89,43	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	85,6	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	102,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang urusan/Indikator/Kinerja Pembangunan Daerah	KONDISI	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	Pendidikan						
1.5	Angka partisipasi sekolah						
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	94,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	115,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5.3	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	107,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.6	Angka Putus Sekolah						
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Angka Kelulusan						
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	102,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.8	Angka Melanjutkan (AM):						
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.9	Fasilitas Pendidikan:						
1.9.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	92,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.9.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	62,66	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
1.11	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	27,24	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	77,50	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
1.13	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	66,81	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
1.14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	0,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.15	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	0,21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.16	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	17,10	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
1.17	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	85,82	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00
1.19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95,71	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00

Sejalan dengan amanat Pasal 18 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selanjutnya, dalam pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib

yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 (pasal 1) juga dijelaskan pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Salah satu Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung adalah di Bidang Pendidikan.

Adapun prinsip dalam penerapan SPM, sesuai dengan Undang-Undang tersebut diantaranya:

1. Kesesuaian Kewenangan, SPM ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan kewenangan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menurut pembagian Urusan Pemerintah terkait dengan Pelayanan Dasar;
2. Ketersediaan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam Rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara Indonesia;
3. Keterjangkauan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar, mudah diperoleh oleh warga negara Indonesia;
4. Berkesinambungan, SPM memberikan memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia harus terukur; dan
5. Ketepatan Sasaran, pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia oleh Pemerintah Daerah harus ditunjukkan pada warga Indonesia yang berhak.

Penerapan SPM di Kabupaten Klungkung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Sebagai pelaksanaan SPM di daerah Kemendagri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal di Daerah yang secara lebih teknis dikeluarkan oleh Kemdikbud dengan Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Dalam penerapannya Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal sudah tidak sesuai dengan dinamik kebutuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga diganti dengan Permendagri 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. Capaian SPM pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Capaian Standar Pelayanan Minimal PAUD

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	%
Jumlah yang Harus Dilayani :	5,348	5,018	330	94 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
Jenis Mutu Barang/Jasa Yang Harus Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
1. Buku gambar	4,240	4,240	0	100.00 %
2. Penyediaan biaya personil Peserta Didik	0	0	0	0 %
3. Alat mewarnai	4,240	4,240	0	100.00 %
4. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	122	95	27	77.87 %
5. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	414	302	112	72.95 %

Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	%
Jumlah yang Harus Dilayani :	25,560	25,490	70	100 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
Jenis Mutu Barang/Jasa Yang Harus Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
1. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	158	147	11	93.04 %
2. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	349	344	5	98.57 %
3. Buku teks pelajaran	25,490	25,490	0	100.00 %
4. Perlengkapan belajar	3,957	3,957	0	100.00 %
5. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1,189	1,189	0	100.00 %
6. Penyediaan biaya personil peserta didik	3,957	3,957	0	100.00 %

7. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1,761	1,761	0	100.00 %
8. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	158	148	10	93.67 %

Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	%
Jumlah yang Harus Dilayani :	230	214	16	93 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
Jenis Mutu Barang/Jasa Yang Harus Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	%
1. Modul belajar	214	214	0	100.00 %
2. Penyediaan biaya personil peserta didik	214	0	214	0 %
3. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	37	30	7	81.08 %
4. Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	0	0	0	0 %
5. Perlengkapan belajar	214	214	0	100.00 %
6. PKBM Terakreditasi minimal C	3	2	1	66.67 %
7. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	3	2	1	66.67 %
8. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	3	3	0	100.00 %

143

BAB VIII
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Perubahan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 untuk dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung dalam penyusunan dokumen perencanaan teknis operasional dalam jangka waktu lima tahun kedepan (Tahun 2018-2023).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan peraturan pelaksanaannya, terjadi perubahan penyelenggaraan urusan dan perangkat daerah yang berlaku efektif Tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut Renstra Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tahun 2018-2023 yang akan menjadi acuan menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD dan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung setiap tahunnya. Secara teknis Renstra SKPD ini juga menjadi pedoman pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan yang dilaksanakan dari tingkat Desa/Kelurahan hingga Kabupaten. Selanjutnya, hasil Musrenbang tersebut akan dirumuskan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja-SKPD) yang secara simultan akan dijadikan bahan penyusunan RKPD Kabupaten Klungkung.

Dengan komitmen penyusunan rencana kerja tahunan yang berpedoman pada Renstra SKPD ini, maka pada Renja-SKPD tahun kelima sasaran-sasaran pada Renstra-SKPD sudah dapat dituntaskan sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 dapat diwujudkan.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA 